

EDISI 22/SEPTEMBER 2019

Masyarakat

ASEAN

4.0

MENUJU MASYARAKAT ASEAN 4.0

12 KERJA SAMA KEAMANAN
SIBER DI ASEAN DALAM
MENYAMBUUT INDUSTRI 4.0

22 REFORMASI PASAR
LISTRIK AGAR
SWASTA TERTARIK

53 PERESMIAN GEDUNG
SEKRETARIAT
ASEAN

ISSN : 2460-1683



9 772460 168002

DAFTAR ISI

PERSPEKTIF

Industri 4.0 : Mengubah Tantangan Menjadi Peluang | **04**

LAPORAN UTAMA

Menuju Masyarakat ASEAN 4.0 | **06**

Kerja Sama Keamanan Siber di ASEAN dalam Menyambut Industri 4.0 | **12**

Industri 4.0 sebagai Strategi Mengatasi Pengangguran di ASEAN | **16**

LAPORAN KHUSUS

Strategi Kerja Sama IMT-GT Menghadapi Revolusi Industri 4.0 | **19**

Reformasi Pasar Listrik agar Swasta Tertarik | **22**

WAWANCARA

Kalau Ada Kelebihan Makanan, di-DamoGO-in Aja | **30**

Identitas ASEAN: Membumikan ASEAN di Akar Rumput | **36**

LIPUTAN

“Berburu” Bekantan di Hutan Mangrove | **40**

Pesona Hangzhou dari Legenda Ular Putih hingga Alibaba | **44**

Indonesia Mendorong Kolaborasi Diplomasi Digital di Asia-Pasifik | **50**

Peresmian Gedung Sekretariat ASEAN | **54**

POJOK SOSIALISASI

Serunya ASEAN Corner di Diplofest Semarang | **53**

POJOK PSA

Kementerian Luar Negeri Gandeng Akademisi Kritisi Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia | **56**

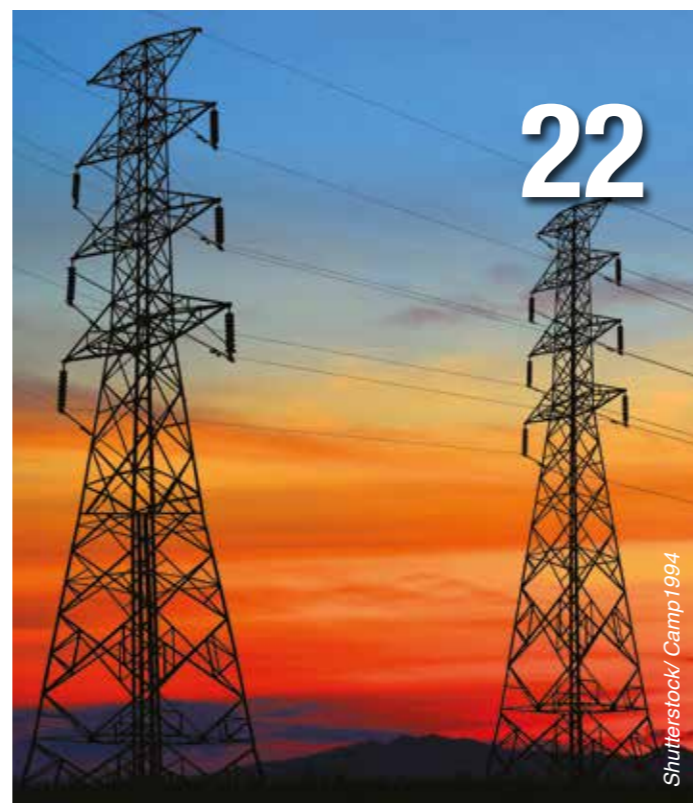
SERBA-SERBI

Membuka Pintu Kesempatan Bagi Ibu dan Anak Muda Filipina | **58**

Kesempatan Tanpa Batas untuk Teman Disabilitas | **60**

GALERI FOTO | 62

INFOGRAFIS | 63



PENANGGUNG JAWAB
Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN
Sekretaris Ditjen Kerja Sama ASEAN

REDAKTUR
Rahmat Azhari
Bramantya Dewabrata
Ahmad Firman Sejati

PENYUNTING/EDITOR
Fadila Rahmatan Putri
Muhammad Aris Yunandar
Rafhael Riando Rumampuk
Shirley Basauli Agustina
Annisya Khairati
Fransisca Dian Putri K.S
Shofi Nurul Himmah
Thalita Hindarto
Ivorry Chaka Nathara P.
Lindi Mahesi
Eriz Ageng Wicaksono
Endang Susilowati
Syarifah Nadya Mahdini

DESAIN GRAFIS/FOTOGRAFER
Geovannie Foresty Palembangan
Oilong Philipus Sarwom
Dwi Widayana
Primadiana Sari
Mulyanto
Iman Heri Patwono
Tuwuh Ismail
Heriyadi Setiawan

SEKRETARIAT
Wihdiasmara Lia Farhatin
Delitha Maghfira
Syifa Fauzi A.
Sasi Harianti
Khusnul Khatimah
Yangyang

ALAMAT REDAKSI
Direktorat Jenderal
Kerja Sama ASEAN
Kementerian Luar Negeri
Jl. Taman Pejambon No.6,
Jakarta Pusat
Telp. 021 - 3509050 / 3509059
Fax. 021 - 3509050



Dok.Pribadi

INDUSTRI 4.0: MENGUBAH TANTANGAN MENJADI PELUANG

Opini masyarakat terpecah, ada yang melihat Industri 4.0 atau *4th Industrial Revolution* (4IR) sebagai peluang, ada yang melihatnya sebagai ancaman. ASEAN pun tidak luput dari perkembangan 4IR tersebut. Bagaimana sebenarnya kita harus menyikapi 4IR? Sumber Daya Manusia Unggul, Indonesia maju, merupakan jawaban Presiden Joko Widodo.

Apakah 4IR itu?

Perkembangan ekonomi dan dunia industri merupakan indikasi utama sebuah revolusi industri. Revolusi industri pertama (1IR) ditandai dengan penggunaan air dan tenaga uap untuk menggerakkan suatu sistem produksi. 2IR ditandai dengan penggunaan tenaga

listrik untuk mempermudah proses produksi massal. 3IR merupakan gabungan dari peralatan elektronik dan teknologi informasi pada proses produksi. Sedangkan 4IR merupakan perpanjangan dari 3IR yang memiliki area kunci pada perpaduan *internet of things*, *artificial intelligence*, *wearable technology*, *robotics* dan *3D printing* untuk optimalisasi proses industri.

Perkembangan baru ini membawa berbagai peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, seperti keterbukaan jangkauan pasar yang lebih luas, peningkatan produktifitas, pengurangan biaya produksi, serta keterbukaan peluang kerja yang lebih luas bila kita memiliki kemampuan dalam memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Namun dibalik itu,

juga terdapat berbagai tantangan, seperti kemandirian siber, *data leaking* serta berkurangnya lapangan pekerjaan yang dialihkan pada penggunaan teknologi.

Indonesia dan ASEAN menghadapi 4IR

Pada sosialisasi Persiapan Indonesia menuju Industri 4.0, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa revolusi industri kali ini akan berdampak terhadap percepatan perubahan yang hampir 3.000 kali lebih besar dari 200 tahun yang lalu. Untuk itu, dalam menghadapi 4IR, Indonesia telah membuat peta jalan dengan nama "Making Indonesia 4.0". Melalui peta jalan ini, Indonesia akan merevitalisasi sektor industri secara menyeluruh agar dapat masuk dalam sepuluh besar kekuatan ekonomi dunia pada 2030.

Integrasi *internet of things* dengan pendidikan vokasi, penggunaan *big data*, *autonomous robot*, dan *cloud* untuk memacu pertumbuhan industri merupakan beberapa upaya yang dilakukan dalam menghadapi dan mengambil manfaat dari 4IR. Upaya lainnya adalah inovasi teknologi dan pengembangan industri *startup* yang akan mendorong penciptaan bisnis berbasis teknologi.

Selain itu, pelibatan pemuda juga merupakan salah satu kunci dalam menghadapi 4IR. Data BPS 2018 menunjukkan bahwa jumlah generasi millennial yang berusia 20-35 tahun mencapai 24 persen, setara dengan 63,4 juta dari 179,1 juta jiwa yang merupakan usia produktif (14-64 tahun). Dengan bonus demografi yang kita miliki dan sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo agar fokus dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia, maka Indonesia diharapkan dapat bersaing dan mengambil peluang sebanyak-banyaknya dari 4IR ini. Pemuda sebagai generasi yang melek teknologi, diharapkan dapat mengembangkan kapasitas dan pengetahuan sebaik mungkin agar tidak tergantikan oleh mesin, robot dan teknologi lainnya.

Dalam konteks kerja sama regional, ASEAN sendiri sudah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi 4IR. Badan-badan sektoral di ketiga pilar ASEAN telah membahas isu ini. Sekretariat ASEAN, misalnya, telah mengukur kesiapan Negara

Anggota ASEAN dalam menghadapi 4IR dan telah melaporkannya kepada para Menteri Ekonomi ASEAN pada tahun 2018.

ASEAN juga telah menghasilkan beberapa dokumen berisi strategi dan pedoman dalam mempersiapkan diri dan menghadapi 4IR. Dokumen-dokumen tersebut, antara lain *ASEAN Digital Integration Framework Action Plan (DIFAP) 2019-2025*, *Guidelines on Skilled Labour/ Professional Services Development in Response to The Fourth Industrial Revolution*, *ASEAN Declaration on Industrial Transformation to Industry 4.0*, dan *Policy Guideline on Digitalisation of ASEAN Micro Enterprises* dan *ASEAN ICT Masterplan 2020*. Dengan berbagai rujukan yang ada, kedepannya tinggal bagaimana Indonesia dan Negara Anggota ASEAN lainnya dapat secara efektif mengimplementasikan strategi dan pedoman yang ada.

Pengembangan infrastruktur teknologi dan peningkatan kapasitas SDM merupakan hal penting lainnya yang harus dikuatkan dalam menghadapi 4IR. Implementasi 4IR baiknya juga dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing negara agar dapat meminimalisir dampak negatifnya.

Untuk meningkatkan pemahaman pembaca, Majalah Masyarakat ASEAN edisi kali ini akan secara khusus membahas tentang berbagai aspek dari perkembangan 4IR di ASEAN. Saya mengharapkan pembaca dapat memahami 4IR agar dapat meraih peluang yang ditawarkan dan menghadapi tantangan yang dimunculkan oleh 4IR.

Semoga edisi kali ini membuat sahabat ASEAN semakin percaya diri menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Salam,

Jose Tavares

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN

MENUJU MASYARAKAT ASEAN 4.0



Disrupsi dapat muncul dalam berbagai wujud, namun tak ada yang memiliki dampak lebih besar ketimbang disrupsi yang ditimbulkan oleh revolusi industri. Kamus Besar Bahasa Indonesia bahkan menyebut revolusi industri sebagai perubahan radikal. Kali ini, dunia tengah mempersiapkan diri menuju Revolusi Industri Keempat/Fourth Industrial Revolution (4IR) yang sering juga disebut sebagai Revolusi Industri 4.0, sebuah masa di mana dunia terintegrasi dalam jaringan internet yang tidak lagi tersekat-sekat. Harapan besar dari revolusi ini tentu adalah peningkatan kesejahteraan. Di ASEAN, nilai ekonomi digital diperkirakan dapat mencapai US\$ 625 miliar pada 2030. Namun kenyataannya, masih ada masyarakat ASEAN yang bahkan belum dapat menikmati revolusi industri kedua dan ketiga. Siapkah ASEAN melangkah maju menuju industri 4.0?

Kesenjangan Ekonomi

Terdapat kekhawatiran bahwa Industri 4.0 akan semakin memperluas kesenjangan ekonomi; antara yang berpenghasilan tinggi dan yang berpenghasilan rendah; antara yang terampil dan yang tidak terampil; dan kesenjangan antara yang siap beradaptasi dengan yang menolak perubahan. Kekhawatiran ini dapat dipahami, mengingat revolusi ini terjadi di saat negara-negara ASEAN tengah berupaya keras menjembatani kesenjangan yang memang masih dirasakan oleh masyarakatnya, yang juga baru mulai merasakan manfaat dari upaya tersebut.

Perbandingan data dan statistik dapat menegaskan argumen tersebut. Pada 1999, setelah berhasil melakukan stabilisasi atas pemerintahannya, Kamboja menjadi anggota terbungsu ASEAN. Keanggotaan ASEAN tidak berubah hingga kini sehingga titik tersebut menjadi rujukan yang tepat untuk melakukan perbandingan. Pada tahun tersebut, Bank Dunia mengestimasi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara mencapai 96 kali lebih besar dari PDB Laos yang memiliki ekonomi terendah di kawasan. Pada 2017, kesenjangan ini berkurang hingga hanya menjadi 60 kali lipat. Bahkan, secara nominal PDB Laos meningkat 11 kali lipat hanya dalam kurun waktu

20 tahun. Artinya kesenjangan ekonomi antara satu negara anggota ASEAN dan lainnya, dan antara satu penduduk ASEAN dengan penduduk ASEAN lainnya, semakin mengerucut.

Sehingga tidak menjadi pertanyaan besar jika banyak penduduk ASEAN yang melihat Industri 4.0 sebagai disrupsi di tengah upaya dan kerja keras mereka dalam memangkas kesenjangan ekonomi. Di satu sisi internet-of-things akan memudahkan hidup, karena

segala hal kini dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan lebih cepat, di mana pun dan kapan pun. Namun di sisi lain, hal ini juga menjadi beban berat karena akan muncul tuntutan untuk menyelesaikan segala hal secara instan, menghapus adanya batasan dimensi waktu dan jarak. Beban ini semakin terasa berat bagi mereka yang belum memiliki keterampilan, atau infrastruktur pendukung yang cukup untuk dapat memaksimalkan Industri 4.0.

Bonus Demografi?

ASEAN cukup beruntung, negara anggotanya tengah menikmati bonus demografi. Rasio ketergantungan di kawasan pun terus menyusut dan diharapkan generasi muda yang melek teknologi akan dapat menyokong pertumbuhan ekonomi yang kuat untuk beberapa dekade ke depan. Namun agar sebuah susunan demografi dapat dikatakan sebagai sebuah bonus, maka ASEAN harus dapat menjamin populasi penduduknya yang berada pada usia kerja tidak menjadi

penghambat. Artinya, generasi mudanya harus dapat merealisasikan potensinya dan harus memiliki keinginan untuk maju. Masih ada masyarakat ASEAN yang sulit melangkah menuju perubahan, baik disebabkan oleh keterbatasan pada dirinya, maupun keterbatasan yang ada pada lingkungan sekitarnya. Bahkan, masih banyak yang menolak beradaptasi karena sulit keluar dari zona nyaman. Seluruh negara anggota ASEAN perlu memperhatikan hal ini, karena pada akhirnya, apa hasil yang dapat diharapkan dari sebuah populasi yang tidak memiliki keterampilan, dan tidak bersedia ataupun mampu untuk melangkah ke industri 4.0?

Perlu juga untuk dicatat, bahwa memaksimalkan bonus demografi bukanlah pilihan, namun keharusan. Ketidakmampuan untuk memanfaatkan kesempatan berpotensi mengubah bonus demografi menjadi bencana demografi. Rasio ketergantungan rendah yang sebetulnya merupakan hal yang baik karena rendahnya beban bagi populasi pekerja, dapat juga diartikan bahwa nasib dari negaranya akan bertumpu pada bagaimana potensi dari populasi tersebut dapat direalisasikan secara maksimal.

Terlebih, terdapat kecenderungan bahwa bonus demografi akan berujung menjadi defisit demografi, di mana terdapat *ageing* population. Hal ini karena pada 20-30 tahun mendatang, kelompok pekerja yang saat ini merupakan mayoritas populasi, akan mencapai usia pensiun. Makin berkurangnya angka kelahiran dan meningkatnya angka harapan hidup pada saat ini akan membentuk piramida populasi terbalik pada akhir masa bonus demografi,. Di Asia Tenggara, tingkat fertilitas dilaporkan menurun drastis dari 5,5 pada tahun 1970, hingga 2,11 pada 2017 Artinya rasio ketergantungan di ASEAN dalam beberapa dekade mendatang berpotensi meningkat drastis, ditandai dengan jumlah pensiunan yang akan melampaui populasi pekerja.

Antara Manusia dan AI

Di sisi lain, pada era otomasi 4.0, dan bahkan sudah mulai semenjak era mesin pada revolusi industri 3.0, terdapat kekhawatiran bahwa revolusi industri justru mengurangi jumlah lapangan kerja. Seringkali kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) berhasil

Kesenjangan Ekonomi di Thailand



membuktikan bahwa ia dapat bekerja sebaik manusia, dan bahkan untuk beberapa kasus lebih baik dari manusia. Ironinya, ini terjadi di masa bonus demografi, di masa keterlibatan seluruh penduduk pada usia kerja perlu dimaksimalkan.

Tentu harapannya adalah para pekerja dapat menjadi motor penggerak revolusi, sehingga tidak digantikan dengan adanya otomasi, namun justru ada untuk mengendalikan serta mengelola otomasi tersebut. Tetapi agar harapan ini dapat terwujud, maka dibutuhkan keterampilan dan keahlian yang memadai. Jika ASEAN tidak dapat meningkatkan status pekerja berketerampilan rendahnya menjadi pekerja terampil, maka angka pengangguran dapat meningkat, dan bencana demografi akan membayangi.

Lebih lanjut, data yang dikompilasikan oleh ASEAN Stats pada 2018 menunjukkan masih terdapat pekerjaan rumah besar bagi ASEAN. Data tersebut menyebutkan hanya 48,5 persen dari 642,1 juta penduduk ASEAN yang memiliki akses ke internet.

Untungnya, bahkan tanpa perlu untuk memahami isu-isu kompleks yang disebutkan di atas, generasi muda ASEAN tengah menggandrungi the internet of things. Perusahaan rintisan (*start-up*) unicorn berbasis internet di Asia Tenggara terus menjamur, mulai dari Go-Jek di Indonesia, Grab dari Singapura, hingga VNG Corporation dari Vietnam. Lebih baiknya lagi, perusahaan rintisan tersebut dibentuk dan ditumbuhkan langsung oleh pasar, bukan program pemerintah untuk menggenjot semangat industri 4.0. Dalam hal ini, peran pemerintah pun dapat lebih fokus pada memfasilitasi dan mengatur, contohnya melalui Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang sedang dilakukan oleh Indonesia. Artinya, telah terdapat keinginan dan pemikiran yang kuat bagi masyarakat ASEAN untuk melangkah menuju Industri 4.0, bukan karena paksaan, namun karena kebutuhan.

“Transformasi digital jangan dilaksanakan hanya dalam rangka ikut-ikutan atau memenuhi kriteria 4.0.”

Pentingnya Koordinasi ASEAN

Namun perkembangan teknolog industri 4.0 tidak hanya akan dirasakan perubahannya oleh pelaku industri saja. Dampak dari revolusi industri 4.0, baik positif maupun negatif akan bersifat lintas batas. Ini menjadi alasan

pentingnya sebuah upaya kolektif dari ASEAN untuk mempersiapkan revolusi industri yang inklusif. Tanpa adanya koordinasi yang baik antara negara anggota ASEAN tidak hanya akan mengakibatkan kesenjangan antara satu negara dan yang lainnya, namun juga akan membawa kawasan tersebut

pada ketidakaturan. Untuk itu perlu ada sebuah upaya terkoordinasi dari ASEAN untuk menyambut Industri 4.0.

Untuk itu, ASEAN ICT Masterplan (AIM) menjadi sangat penting untuk mendorong tercapainya digitally-enabled economy. AIM merupakan langkah awal yang baik untuk ASEAN, dan diharapkan dapat menjadi visi besar untuk mempersiapkan langkah ASEAN menuju revolusi industri keempat, beserta seluruh implikasinya. AIM periode 2015-2020 akan segera berakhir, dan saat ini sedang disusun AIM periode berikutnya yang akan berfokus pada empat hal penting; yaitu konektivitas infrastruktur digital; harmonisasi peraturan dan regulasi; peta jalan untuk pembangunan smart city; dan pengembangan tenaga kerja digital.

Kabar baiknya, negara-negara anggota ASEAN paham atas situasi yang mereka hadapi, dan telah meluncurkan upaya berskala nasional untuk mempersiapkan diri. Misalnya, Making Indonesia 4.0 milik Indonesia, visi Smart Nation milik Singapura, hingga inisiatif Digital Free trade Zone milik Malaysia. Jelas terlihat bahwa setiap negara tengah mempersiapkan diri, agar tidak hanya menjadi penonton atau bahkan menjadi korban dari gelombang revolusi industri. Namun kabar kurang baiknya, ini juga dapat menjadi akar permasalahannya. Setiap negara anggota ASEAN memiliki rencananya masing-masing, dan belum jelas terlihat adanya kesinambungan maupun koordinasi antara visi negara-



Demonstrasi yang dilatarbelakangi konflik antara perusahaan taksi dengan penyedia ojek online berulang kali terjadi dikarenakan adanya penolakan atas beroperasinya ojek online.

negara anggota ASEAN untuk 4.0. Ini pekerjaan rumah bagi ASEAN yang perlu diselesaikan.

Menuju Masyarakat ASEAN 4.0

Di balik dorongan dan dukungan atas segala upaya menuju Industri 4.0, terdapat satu hal penting yang perlu ditegaskan: transformasi digital jangan dilaksanakan hanya dalam rangka ikut-ikutan atau memenuhi kriteria 4.0. Harus dapat dipahami dengan jelas mengapa transformasi digital tersebut diperlukan, dan mengapa transformasi tersebut justru dapat membuat masalah yang tidak perlu jika tidak direncanakan dengan baik.

Saat ini, di Indonesia masih banyak inovasi digital yang belum jelas artinya, sehingga justru memperpanjang tahapan proses pelayanan ketimbang memperpendeknya. Inovasi memang tidak perlu menciptakan hal baru, namun ia perlu hadir untuk menjawab sebuah masalah atau memberi kemudahan. Ketika ia justru memberikan masalah baru, maka ia tak lebih dari ilusi atas inovasi. Cara berpikir masyarakat ASEAN tentang arti revolusi

digital perlu diluruskan, baik itu dalam inisiatif untuk melakukan perubahan maupun dalam toleransi terhadap perubahan. Banyak inisiatif seperti aplikasi ride-hailing yang harus melalui fase penolakan terlebih dahulu sebelum masyarakatnya dapat menerima bahwa inilah masa depan, suka atau pun tidak. Negara anggota ASEAN wajib mencatat hal ini. Karena tidak ada yang lebih buruk ketimbang ASEAN yang masa depannya bergantung kepada masyarakat yang tak hanya tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan arus perubahan, namun juga cenderung menolak perubahan.

Eriz Wicaksono

Kepala Subbagian Perencanaan
Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN

KERJA SAMA KEAMANAN SIBER DI ASEAN DALAM MENYAMBUT INDUSTRI 4.0

Perkembangan industri global tengah bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan industri yang kian kompetitif dan kompleks. Pesatnya kemajuan teknologi telah membawa kita pada fenomena baru yang dikenal dengan Industri 4.0 – sebuah era industri yang sistem produksinya bersifat *data-driven*, atau lebih tepatnya *cyber-physical systems* atau *Internet of Things (IoT)*.

Saat ini, dunia sedang mengalami revolusi industri keempat berbasis IoT yang bergantung pada berbagai teknologi sebagai prasyaratnya, seperti *Wireless Sensor Networks (WSNs)*, *machine-to-machine (M2M) systems*, *big data*, *cloud services*, aplikasi di telepon pintar, dan *radio frequency identification (RFID)*. Perubahan besar ekonomi global Industri 4.0 menuntut dukungan sistem siber yang cerdas dan terkoneksi untuk menjalankan seluruh tahapan operasi industrinya – mulai dari desain dan manufaktur hingga tahap operasional, rantai pasokan dan layanan pemeliharaan.

Dengan Industri 4.0, interkoneksi tak dapat dielakkan. Interkoneksi menghubungkan mitra, pengguna, pegawai, dan sistem untuk mempercepat performa bisnis sekaligus menjadi prasyarat bagi akses instan terhadap data yang saling terkait dan bersifat *real-time* antar industri dan antar lokasi geografis yang berbeda.

Namun, ketergantungan Industri 4.0 terhadap data dan gabungan antara teknologi informasi dan teknologi operasional turut di dalamnya membawa



Shutterstock/ Rawpixel.com

tantangan baru, terutama terkait dengan keamanan siber (*cybersecurity*). Keamanan siber adalah isu utama yang menjadi fokus pemerintah dalam upaya melindungi informasi bisnis dan informasi digital berharga lainnya dari sebuah subjek atau sistem dari penyalahgunaan, akses ilegal, dan pencurian data. Dengan berkembangnya jaringan koneksi internet, serangan siber dan penyalahgunaan data untuk berbagai hal yang berkaitan dengan bidang finansial dan strategis juga terus meningkat.

Perkembangan teknologi dan meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi yang terkoneksi

secara global turut membuka celah kepada peretas mengembangkan alat dan metode yang semakin canggih, efisien, dan efektif. Dengan demikian, perkembangan teknologi digital menjadi dua sisi mata pisau yang tidak hanya bermanfaat bagi pertumbuhan bisnis dan industri, namun di saat bersamaan membuka celah ancaman bagi data personal dan sistem.

Dengan dampak besar pada keselamatan, keamanan, dan privasi warga negara karena sifat fisik-maya dan otonomi yang melekat, lanskap ancaman terkait dengan Industri 4.0 dan IoT sangat luas. Dengan

demikian dibutuhkan penguatan ketahanan siber, baik di level nasional maupun regional dalam menghadapi ancaman dan tantangan ini.

Kerja sama siber, khususnya penanganan kejahatan siber (*cybercrime*) dan keamanan siber (*cybersecurity*), telah menjadi area fokus utama di berbagai mekanisme ASEAN. Kerja sama siber di ASEAN berada di bawah Pilar Masyarakat Politik-Kemanan ASEAN (APSC) dan Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC). Dalam APSC, kerja sama siber dibahas melalui berbagai mekanisme, antara lain ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime/Senior Officials Meeting on Transnational Crime (AMMTC/SOMTC), ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus (ADMM-Plus) dan ASEAN Regional Forum (ARF). Sedangkan, di bawah pilar AEC, isu siber berada di bawah mekanisme ASEAN Telecommunications Ministers Meeting/ ASEAN Telecommunications Senior Officials Meeting (TELMIN/TELSOM).

Komitmen ASEAN dalam kerja sama siber tercantum dalam berbagai dokumen utama yang menjadi dasar kerja sama *cyber* di ASEAN, antara lain ASEAN Leaders' Statement on Cybersecurity Cooperation, ASEAN Declaration to Prevent and Combat Cybercrime, ASEAN Framework on Personal Data Protection, ARF Statement by the Ministers of Foreign Affairs on Cooperation in Ensuring Cyber Security, dan ASEAN Leaders' Statement on Cybersecurity Cooperation.

Di dalam forum AMMTC/SOMTC, kejahatan siber merupakan salah satu dari 10 jenis kejahatan lintas negara yang menjadi prioritas ASEAN. Singapura menjadi koordinator – biasa disebut dengan *lead shepherd* – area kerja sama *cybercrime* dan sekaligus Ketua ASEAN Senior Officials' Meeting on Transnational Crime Working Group on Cybercrime (SOMTC WG on CC). Kerja sama SOMTC dalam pemberantasan *cybercrime* antara lain mencakup pertukaran informasi dan intelijen, kerja sama di bidang hukum/antar penegak hukum, peningkatan kapasitas, pelatihan, seminar/lokakarya, dan penelitian.

Beberapa bentuk kerja sama penanganan kejahatan siber yang diupayakan di tingkat SOMTC sebagaimana tertera di dalam SOMTC Work Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime (2016-2018) antara lain: 1) menyusun daftar narahubung unit-unit investigasi dan penegakan hukum di bidang *cybercrime* di seluruh negara anggota ASEAN untuk memperkuat kerja sama di antara mereka, termasuk untuk kebutuhan bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi; 2) berupaya untuk mengkriminalisasi aktivitas kejahatan siber di seluruh negara anggota ASEAN; dan 3) memperkuat kemampuan negara anggota ASEAN dan aparat penegak hukumnya untuk melakukan investigasi forensik kejahatan siber.

Di dalam forum ADMM-Plus, isu *cybersecurity* menjadi salah satu area yang dikerjasamakan dalam bentuk ADMM-Plus Experts' Working Group on Cyber Security (EWG on CS). Tujuan pembentukan ADMM-Plus EWG on CS yang diinisiasi oleh Filipina ini adalah untuk mengatasi tantangan keamanan siber di kawasan melalui saling berbagi informasi dan pengalaman terbaik; saling berbagi teknologi, peralatan, dan sumber daya; serta menyelenggarakan pelatihan dan latihan bersama. Saat ini, EWG on CS diketuai bersama oleh Filipina dan Selandia Baru untuk periode 2017-2020.

Dokumen utama yang menjadi dasar kerja sama mekanisme ini adalah ADMM-Plus Work Plan EWG on CS 2017-2020. Dokumen tersebut memuat rencana penyelenggaraan lokakarya dan seminar terkait dengan *cybersecurity*, identifikasi *subject-matter-experts* yang akan menjadi anggota permanen EWG, pembuatan database hasil seluruh kegiatan EWG on CS, Table-Top Discussion, Table-Top-Exercise (TTX) untuk membuat ADMM-Plus Cyber Security Framework, dan Identifikasi Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di setiap negara anggota ADMM-Plus, yang akan menjadi *point-of-contact* jika terjadi insiden siber.

Sementara di dalam ASEAN Regional Forum (ARF), kerja sama penanganan *cybersecurity* dilakukan di bawah kerangka ASEAN Regional Forum Inter-

Sessional Meeting on Information and Cyber Technology (ARF ISM on ICT). Tujuan dari area prioritas ini adalah mendorong terciptanya lingkungan ICT yang damai, aman, berketahanan, dan kooperatif, serta mencegah konflik dengan membangun rasa saling percaya dan pembangunan kapasitas.

Kerja sama siber juga terus dibangun dengan negara mitra wicara ASEAN yang sudah cukup maju dalam hal ketahanan siber, seperti Jepang melalui ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre yang diresmikan di Thailand pada Juni 2018. Pusat ini bertujuan mengembangkan angkatan kerja di bidang *cybersecurity* di ASEAN, khususnya di lembaga pemerintah dan operator infrastruktur informasi kritis di ASEAN. Pusat ini diharapkan memainkan peran kunci dalam mengurangi kejahatan dunia maya di kawasan tersebut serta bersiap-siap untuk pembentukan Computer Emergency Response Team (ASEAN-CERT). Proyek ini telah menerima pendanaan dari Jepang melalui Japan-ASEAN Integration Fund

(JAIF) dan dukungan dalam hal keahlian teknis untuk melakukan pelatihan yang efektif di bidang siber bagi negara anggota ASEAN.

Di luar mekanisme ASEAN, Singapura telah tiga kali menyelenggarakan ASEAN Ministerial Conference on Cybersecurity. Pertemuan ke-3 telah dilaksanakan pada September 2018 di Singapura. Singapura sangat giat memajukan kerja sama di bidang siber karena Singapura sangat rentan terhadap serangan siber daripada banyak negara lainnya, karena terkoneksi ke begitu banyak negara dan kawasan. Pemerintah Singapura telah membentuk badan keamanan siber atau Cyber Security Agency (CSA) pada 2015, yang kini telah memiliki kemampuan beroperasi penuh setelah melakukan uji coba pengamanan ke-11 sektor infrastruktur informasi penting di Singapura. Sebuah inisiatif baru bernama ASEAN-Singapore Cybersecurity Centre of Excellence (ASCCE) juga akan diluncurkan pada akhir tahun ini sebagai pusat untuk respons cepat terhadap serangan siber dan wadah berbagi informasi

serta peningkatan kapasitas dalam bidang siber bagi negara ASEAN.

Kerja sama siber tentu tidak dapat dilihat semata-mata sebagai permasalahan yang hanya dihadapi suatu negara. Karena sifatnya yang saling terhubung, semua negara terbuka terhadap serangan siber yang bisa terjadi kapan pun. Untuk mengatasi tantangan dan ancaman siber tersebut, dibutuhkan kerja sama yang kuat di ASEAN dan dengan negara mitra wicara untuk memperkuat ketahanan siber dari waktu ke waktu seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan digital. Dengan demikian, sebuah prasyarat penting bagi terciptanya lingkungan yang aman bagi Industri 4.0 untuk terus berkembang telah terpenuhi dengan baik.

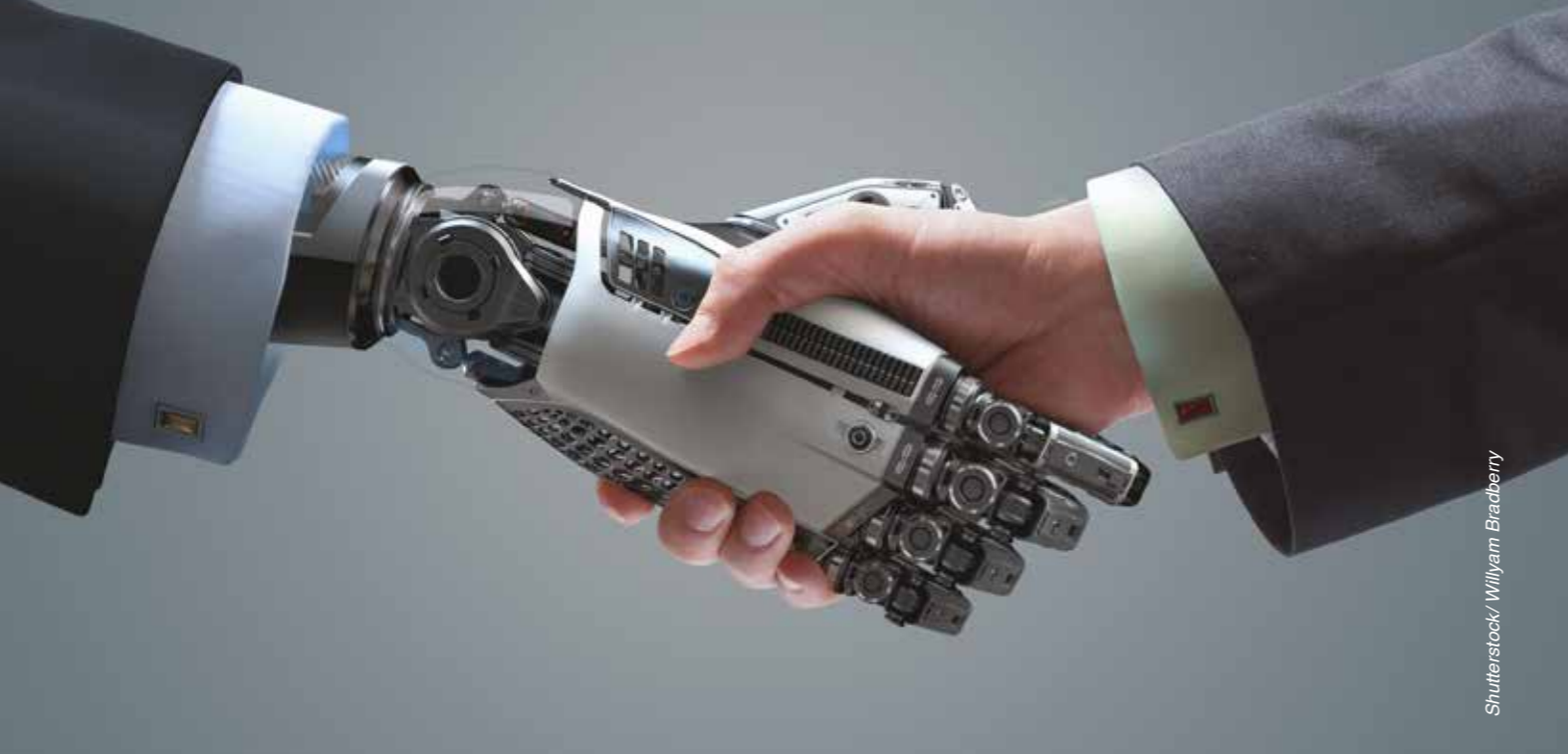
Muhammad Aris Yunandar

Fungsional Diplomat

Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN



INDUSTRI 4.0 SEBAGAI STRATEGI MENGATASI PENGANGGURAN DI ASEAN



Shutterstock/William Bradberry

Kemajuan teknologi berperan dalam modernisasi. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi banyak aspek, salah satunya aspek ekonomi. Revolusi industri terjadi akibat penemuan teknologi yang memiliki dampak besar, yang berkaitan dengan fenomena terbaru industri 4.0. Industri 4.0 adalah fenomena yang digagas Jerman sejak 2017 dengan menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber di dunia industri seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), *blockchain*, dan mesin cetak 3D.

Teknologi otomatisasi dapat mempengaruhi pengurangan tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran akan meningkat. Berdasarkan data dari ASEANstats, tingkat pengangguran di negara-negara anggota ASEAN cenderung fluktuatif.

Sekretariat ASEAN mencatat Filipina memiliki tingkat pengangguran tertinggi yaitu 6,6 persen disusul Brunei Darussalam (6,1 persen), dan Indonesia (5,3 persen). Sedangkan Thailand memiliki tingkat pengangguran terendah yaitu 1,2 persen diikuti Kamboja (1,6 persen) dan Laos (1,8 persen).

Perkembangan teknologi otomatisasi tidak lepas dari peran teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang dapat dipandang sebagai salah satu komponen pendukung dari industri 4.0. Perkembangannya di ASEAN cukup beragam. Menurut International Telecommunication Union, data perkembangan ICT yang dirangkum menjadi Indeks Pengembangan ICT (IDI), negara-negara ASEAN seperti Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia berada pada ranking 70

besar dunia dengan skor di atas 6. Thailand, Filipina, Vietnam, dan Indonesia berada pada ranking 120 besar dengan skor 4-6. Adapun Kamboja dan Laos berada pada ranking 140 besar dengan skor 3-4.

Sektor-sektor industri yang produktif memiliki peran penting dalam meningkatkan perkembangan ekonomi suatu negara. Sektor utama negara-negara anggota ASEAN berdasarkan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) terbagi menjadi tiga, yaitu sektor jasa, manufaktur, dan agrikultur. Singapura adalah negara dengan kontribusi sektor jasa terbesar yaitu 67,1 persen dari total PDB. Sedangkan Brunei Darussalam adalah negara yang mengandalkan sektor manufaktur pada perekonomiannya dengan besaran 63,2 persen dari total PDB. Adapun Myanmar memiliki sektor agrikultur dengan kontribusi 25,9 persen dari total PDB.

Distribusi pekerja pada sektor industri yang produktif juga termasuk poin penting karena merefleksikan efisiensi. Berdasarkan data dari ASEANstats database tahun 2017, distribusi pekerja berdasarkan sektor utama industri pada negara Laos dan Kamboja ada pada sektor agrikultur dengan besaran 71,7 persen dan 54,9 persen dari total pekerja di dua negara

tersebut. Disusul oleh Myanmar (48,8 persen), Vietnam (41,9 persen), Indonesia (31,9 persen), Thailand (30,2 persen), Filipina (28,3 persen) dari total pekerja di negara tersebut. Sektor manufaktur memiliki kontribusi di Malaysia sebesar 48,1 persen dari total pekerja di negara itu, Thailand (38,5 persen dari total pekerja), dan Vietnam (25,1 persen dari total pekerja). Sedangkan sektor jasa memiliki kontribusi sebesar 81,4 persen dari total pekerja di Singapura, disusul Filipina (47,9 persen), dan Indonesia (47,6 persen).

Pada tabel 1 dapat disimpulkan dampak ekonomi yang timbul akibat digitalisasi industri 4.0 mencapai US\$ 216-627 triliun. Sektor yang paling tinggi memberikan pengaruh adalah *Operations management–manufacturing* mencapai US\$ 76-245 triliun. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan penggunaan *cyber physical–system*. Berdasarkan proyeksi tersebut, diperkirakan dampak dari industri 4.0 di ASEAN pada 2025 sudah mencapai rata-rata hingga 50 persen, seperti pada sektor *Operations management–manufacturing*, *Predictive maintenance–manufacturing*, *Inventory optimization–manufacturing*, dan *Health and safety–manufacturing*.

Fenomena industri 4.0 tidak hanya memberikan

Table 1. Potensi Dampak Ekonomi Industri 4.0 di ASEAN

Aplikasi Berukuran	Potensi Dampak Ekonomi (Miliar USD Per Tahun)	Estimasi Capaian Potensi tahun 2025 (%)
<i>Operations management – manufacturing</i>	76 - 245	50 - 70
<i>Predictive maintenance – manufacturing</i>	38 - 91	50 - 70
<i>Farms – increase farm yield</i>	10 - 57	10 - 30
<i>Inventory optimization – manufacturing</i>	17 - 55	50 - 70
<i>Operations management – hospitals</i>	40 - 54	0 - 50
<i>Health and safety – manufacturing</i>	12 - 38	50 - 70
<i>Hospital – counterfeit drug reduction</i>	5 - 20	20 - 50
<i>Others</i>	22 - 65	
TOTAL	216 - 627	

Sumber :diolah dari Arbulu, Lath, Mancini, Patel, Tonby, 2018. (McKinsey)



proyeksi positif terhadap ekonomi ASEAN tetapi juga memberikan dampak disrupsi ekonomi terhadap proses bisnis tradisional. Untuk mengurangi efek paradoks yang ditimbulkan oleh industri 4.0, dibutuhkan pendekatan yang tepat agar tidak terjadi disrupsi ekonomi dan peningkatan pengangguran. Secara keseluruhan, Indonesia berada pada posisi tengah di antara negara anggota ASEAN lainnya dalam tingkat daya saing (*competitiveness*). Berdasarkan data dari Schwab dan Sala-i-Martin pada 2018 aspek pendukung daya saing Indonesia di level ASEAN adalah pasar yang besar, lingkungan bisnis (makroekonomi), kesehatan, dan pendidikan dasar.

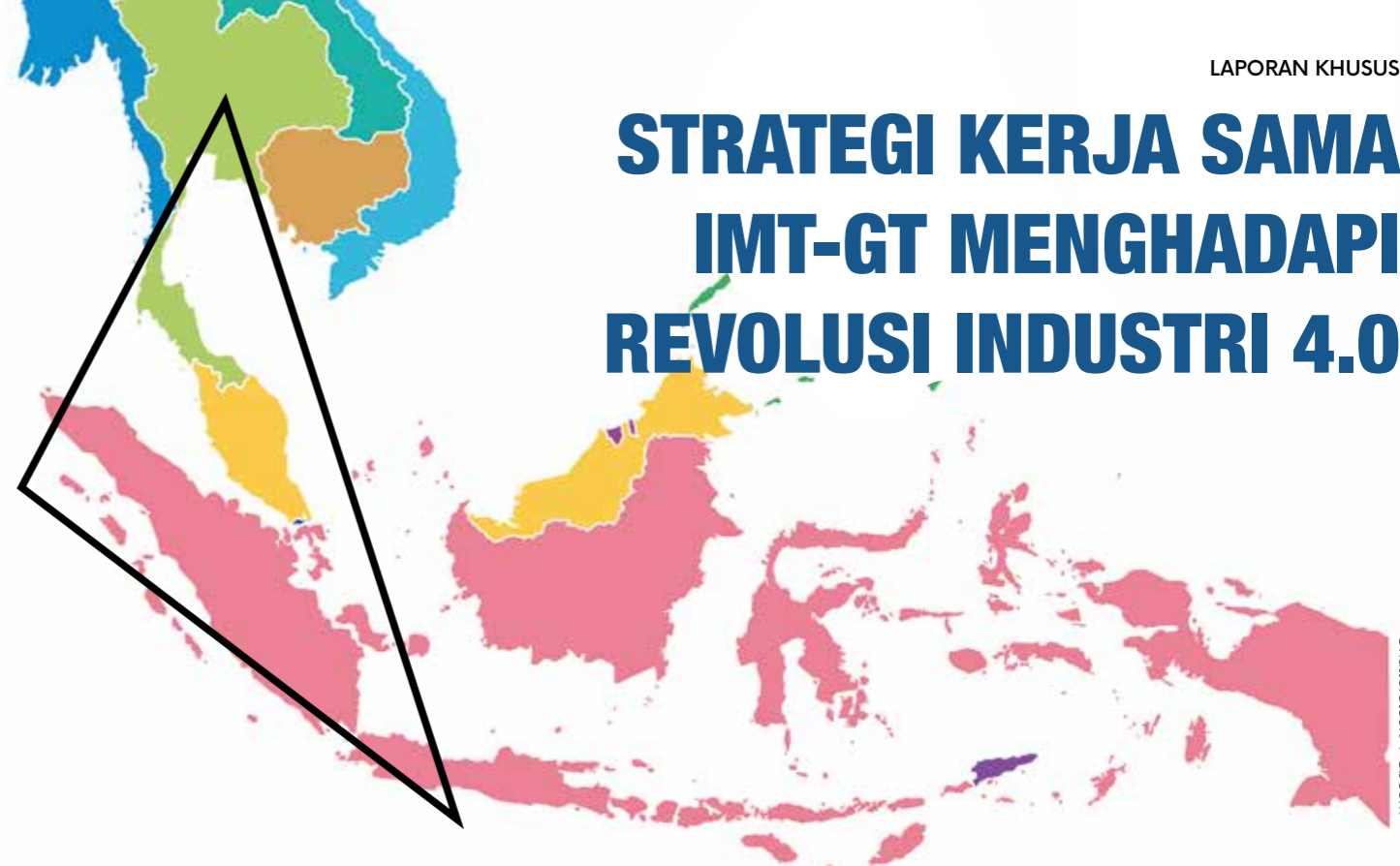
Memenuhi kebutuhan para pelaku industri dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat, cekatan, inklusif, dan terbuka. Kecepatan dalam merespons fenomena yang terjadi di industri akan mengurangi risiko kehilangan biaya peluang (*opportunity cost*). Tentunya diimbangi dengan fleksibilitas untuk mengubah regulasi

dengan tidak menghilangkan tujuan utama dari regulasi tersebut. Data real-time dan big data dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan regulasi. Efektivitas dalam pembuatan regulasi akan terjadi apabila melibatkan setiap stakeholders atau input dari industri terkait. Tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan kolaborasi pada level global mengingat fenomena industri 4.0 tidak hanya pada level daerah. Sehingga, idealnya negara anggota ASEAN bekerja sama mendukung industri 4.0 sebagai fenomena positif untuk industri pada level global, seperti yang tertera pada perjanjian ASEAN ICT Master Plan 2020 dan cetak biru ASEAN Economic Community (AEC) 2025.

Rafi Syadzayori

*Peserta Magang Dit. KSEA (Juli-Agustus 2019)
Universitas Pertamina, Jakarta Selatan*

STRATEGI KERJA SAMA IMT-GT MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0



Bersamaan dengan diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-34, diselenggarakan pula KTT Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-12 pada Minggu, 23 Juni 2019, di Bangkok, Thailand. Dalam pertemuan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini membahas berbagai isu di antaranya tentang isu konektivitas, ekonomi inklusif, dan industri halal. "Kerja sama IMT-GT telah banyak berkontribusi dalam membangun perekonomian subkawasan, termasuk meningkatkan daya saing di daerah-daerah, meningkatkan konektivitas, serta meningkatkan nilai perdagangan, pariwisata, dan investasi," kata Presiden Jokowi.

Di samping itu, dibahas pula mengenai perkembangan kerja sama IMT-GT sesuai dengan dokumen IMT-GT Vision 2036 yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Republik Indonesia, Darmin Nasution. Arah dan kesepakatan para kepala negara juga ikut dibicarakan dalam pertemuan.

Kerja sama IMT-GT diluncurkan pada 1993 sebagai bentuk kerja sama sub-regional. Forum kerja sama tiga negara ini diikuti oleh 32 provinsi dan negara bagian

di ketiga negara, diantaranya berada di kawasan Sumatera (Indonesia), semenanjung Malaya (Malaysia), serta sebagian wilayah selatan Thailand. Wilayah Indonesia yang menjadi bagian dari kerja sama IMT-GT adalah provinsi Aceh, Bangka-Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan tiga hal yang menjadi pandangan nasional Indonesia dalam kerja sama tiga negara ini. Pertama, pentingnya pengembangan dan penyelesaian proyek-proyek konektivitas fisik, sejalan dengan salah satu fokus implementasi IMT-GT Vision 2036. Indonesia berkomitmen kuat untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur konektivitas di Sumatera, seperti jalan tol Trans Sumatera, operasionalisasi LRT di Palembang, pembangunan jalur kereta api, dan pelabuhan, serta jalur pelayaran antara Dumai-Malaka untuk peningkatan perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia.

Pengembangan konektivitas fisik juga diperlukan dalam mendorong pengembangan bidang pariwisata di kawasan IMT-GT. Salah satu potensi besar yang ada

adalah untuk pariwisata laut yang meliputi pariwisata *cruise* dan *yacht*, serta pengembangan sumber daya manusia pelaku usaha sektor pariwisata.

Penandatanganan revisi nota kesepahaman (MoU) tentang konektivitas udara (*air linkages*) juga dilakukan dan diharapkan dapat memberikan manfaat di sektor pariwisata. Meningkatnya konektivitas diharapkan dapat menunjang aktivitas dan integrasi ekonomi di dalam kawasan kerjasama IMT-GT.

Kedua, pentingnya pertumbuhan ekonomi di kawasan IMT-GT yang bersifat berkelanjutan dan inklusif. Sektor pertanian dinilai memiliki peran penting dalam berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan dan inklusif di subkawasan. Komoditas seperti karet dan kelapa sawit memiliki dampak berganda (*multiplier effect*) besar terhadap perekonomian masyarakat IMT-GT. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan kerja sama konkret dalam memajukan industri karet dan kelapa sawit.

Ketiga, Presiden Jokowi berpandangan perlu kerja sama pemanfaatan keunggulan dan potensi masyarakat di subkawasan di sektor industri halal demi mendorong penguatan kerja sama sektor-sektor usaha kecil menengah (UKM) halal yang berorientasi ekspor maupun *start-up* halal. Dalam kesempatan ini, Indonesia menyampaikan rencana penyelenggaraan Halal Summit 2020 pada Oktober 2020.

Kerja sama yang telah terjalin selama 26 tahun ini telah memberikan banyak sumbangan. Tidak hanya ada peningkatan nilai *gross domestic product* (GDP) dari US\$1,007 milyar (2013) menjadi US\$1,258 milyar pada 2017, tetapi juga ada peningkatan di bidang investasi, tingkat pengangguran (*unemployment rate*), serta angka kemiskinan.

Tetapi tantangan tetap ada. Meski demikian, tantangan-tantangan dari luar seperti globalisasi, Revolusi Industri 4.0, urbanisasi, perubahan demografi, hingga perubahan iklim justru mendorong

IMT-GT semakin memperkuat kerja samanya. Hal ini dilakukan dengan cara merespon setiap tantangan yang ada dan melihat adanya kesempatan dalam mengembangkan peluang baru berpedoman pada Cetak Biru Implementasi 2017-2021.

Dalam kesempatan yang sama, para pemimpin ketiga negara juga menyampaikan keinginannya untuk memaksimalkan kekuatan kerja sama sub-regional dan memberikan manfaat bersama yang lebih besar dengan melanjutkan dan melakukan kerja sama baru. Di antaranya adalah proyek integrasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antar negara, penambahan koridor ekonomi, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pertumbuhan ekonomi di kawasan. Teknologi dan inovasi dirasa penting diterapkan untuk menunjang dan memfasilitasi tiap sektor kerja sama potensial baik IMT-GT maupun untuk skala yang berlingkup kawasan yakni ASEAN.

Sebagaimana disampaikan dalam laporan Menko Perekonomian Indonesia Darmin Nasution, untuk hal-hal tersebut, diperlukan penguatan kapasitas di seluruh area pilar kerja sama ekonomi IMT-GT melalui tukar menukar pengalaman dan kerja sama teknis. Untuk itu diperlukan dukungan, koordinasi, dan sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan dalam kerja sama, meliputi pemerintah, baik pusat maupun daerah, akademisi, sektor swasta, termasuk dukungan Sekretariat Bersama Center for IMT-GT Subregional Cooperation (CIMT), serta keterlibatan mitra potensial.

Dalam pernyataan bersama, ketiga negara berkomitmen untuk memperluas kesempatan memulai bisnis/kemitraan, khususnya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), secara inklusif melalui pemberian fasilitas kepada UMKM. Caranya, diantaranya dengan pendirian pusat bisnis dan pelaksanaan pameran dagang berkala, penyusunan sistem informasi



Dok. Pribadi

pasar tenaga kerja untuk memfasilitasi mereka yang membutuhkan informasi tentang peluang tenaga kerja dan proyek baru pendirian *platform e-commerce* untuk *start-up* halal, serta memanfaatkan teknologi untuk pemberdayaan sektor pertanian dan pariwisata.

Begitu pula di bidang pemberdayaan manusia. Ketiga negara mendorong promosi *digital literacy* dan pengembangan keterampilan kerja (*skill development*) di berbagai bidang untuk mempersiapkan tenaga kerja IMT-GT sebagai pendorong utama pertumbuhan yang siap dan mumpuni dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Annisya Khairati, Fungsional Diplomat dan
Intan Karina Hapsari Peserta Magang
Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN

IMT-gt 12th INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND GROWTH TRIANGLE SUMMIT (12th IMT-GT SUMMIT) 23 June 2019, Bangkok Thailand



Dok. Pribadi

REFORMASI PASAR LISTRIK AGAR SWASTA TERTARIK

Untuk dapat bersaing menghadapi persaingan industri di ASEAN, energi merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi daya saing Indonesia. Pasalnya, energi di Indonesia masih menjadi monopoli pemerintah. Di polar negatif monopoli sektor ketenagalistrikan, fenomena mati lampu di beberapa daerah di Indonesia memicu inspeksi mendadak (sidak) oleh Presiden Joko Widodo ke kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) tanggal 5 Agustus 2019. Saat sidak, Presiden mengimbau agar kegagalan penyediaan listrik tidak terjadi lagi.

Pasar ketenagalistrikan Indonesia akan berkembang pesat ke depannya. PLN memprediksi bahwa konsumsi listrik Indonesia pada 2028 akan tumbuh hingga sekitar 430TWh atau hampir dua kali lipat konsumsi listrik saat ini. Namun, tampaknya Indonesia memiliki isu dalam mengembangkan pasar ketenagalistrikannya. Pada 2016, PricewaterhouseCoopers (PwC) mengklaim bahwa konsumsi listrik Indonesia telah melampaui laju pembangunan pembangkit listriknya. Hal ini memaksa PLN untuk melakukan pemadaman listrik bergilir di beberapa provinsi di Indonesia. Pada 2018, masalah yang sama masih mencuat, ditandai dengan banyaknya pemadaman listrik bergilir di berbagai tempat, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah lainnya di Indonesia bagian timur.

Salah satu isu dalam pengembangan pasar ketenagalistrikan Indonesia tampaknya adalah kurangnya investasi. PwC berargumen bahwa Indonesia butuh investasi yang besar dalam pembangunan infrastruktur listriknya. Di lain sisi, PLN mengakui bahwa investasi yang dibutuhkan tersebut lebih besar jumlahnya dari yang PLN dan pemerintah sanggup berikan. Dengan demikian, Indonesia tampaknya membutuhkan bantuan investasi dari swasta. Namun, untuk menarik minat investasi mereka, Indonesia juga perlu menampilkan regulasi pasar ketenagalistrikan yang menarik bagi para investor swasta. Sejarah mencatat bahwa Indonesia telah berupaya dalam hal tersebut. Namun, hasilnya ternyata tidak semulus yang diharapkan.



Shutterstock/ Creative Images

Reformasi Regulasi Pasar Ketenagalistrikan Indonesia dan Partisipasi Swasta

Reformasi pertama regulasi pasar ketenagalistrikan Indonesia terjadi pada 1985. Reformasi ini turut membuka tirai era modern pasar ketenagalistrikan Indonesia. Pada tahun tersebut, Ordonansi Belanda 1890, yang merupakan peraturan terdahulu untuk sektor ketenagalistrikan, dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang (UU) Ketenagalistrikan No. 15 tahun 1985. Undang-undang ini memberikan kuasa hukum yang sangat besar kepada pemerintah dalam pasar ketenagalistrikan Indonesia. UU ketenagalistrikan tersebut memberikan kuasa kepada pemerintahan Indonesia dalam hal: kebijakan sumber daya energi untuk listrik, rancangan integrasi listrik, usaha penyediaan listrik melalui perusahaan milik negara,

harga jual listrik, hingga kondisi operasional, instalasi, dan standarisasi dalam penyediaan listrik.

Meskipun demikian, pasar ketenagalistrikan Indonesia di masa tersebut masih berhasil mendapatkan investasi yang cukup besar dari swasta. Berdiri pada 1994, PT. Paiton Energy (PT Paiton) adalah Produsen Listrik Swasta (Independent Power Producer/IPP), yang pertama dan terbesar di Indonesia hingga saat ini. PT. Paiton memiliki dua pembangkit listrik batubara 615MW yang mulai beroperasi pada 1999. Kedua pembangkit ini berhasil mendapatkan jaminan US\$ 50 juta dari MIGA, salah satu badan investasi dalam World Bank Group, yang dibutuhkan untuk investasi pembangunan dan operasional pembangkit. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit IPP akan dijual ke PLN sesuai dengan

Power Purchase Agreement (PPA) yang berlaku. Dari tahun 1994 hingga 1997, ada lebih dari 20 proyek IPP yang disahkan.

Sayangnya, pertumbuhan ini ternyata hanya berlangsung sementara. Pada 1997, krisis finansial di Asia melanda dan mengacaukan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, terutama yang investasi swasta pada sektor infrastrukturnya sedang subur.

Salah satu yang terhantam paling parah tak lain tak bukan adalah sektor ketenagalistrikan Indonesia. Hal ini diperburuk dengan adanya penyalahgunaan kuasa pemerintahan Indonesia dalam pengelolaan pasar ketenagalistrikan. Sebagian besar PPA di Indonesia diduga dinegosiasikan melalui proses tawar-menawar

yang tidak transparan. Hal ini berujung pada kondisi *take-or-pay*, *dollar-pegged*, dan harga yang terlalu mahal yang menguntungkan investor swasta.

Selain itu, para investor swasta tersebut ditemukan memiliki relasi yang erat dengan presiden dan kerabatnya pada saat itu. Dalam enam bulan pertama di tahun 1998, PLN mengalami kerugian hingga US\$ 1.4 miliar PLN, jatuh bangkrut. Pada masa tersebut, beberapa proyek IPP dinegosiasi ulang PPA-nya ke harga yang jauh lebih rendah. Sebagian besar memilih dibatalkan.

Pada 1998, Suharto turut diturunkan dari kursi presiden. Hal ini diklaim sebagai tanda berakhirnya tirani 32 tahun yang dianggap sebagai salah satu rezim terkorup pada abad 20. Di masa yang kelam ini, dapat dikatakan bahwa para investor swasta telah kehilangan kepercayaan terhadap prospek pasar ketenagalistrikan Indonesia yang rawan terhadap resiko penyalahgunaan kuasa pemerintahan Indonesia.

Tahun 2000–Masa Kini: Deregulasi yang Ditolak, Menjalin Kerangka Kerja Sama

Pada 2002, pemerintahan Indonesia berusaha menarik kembali minat para investor swasta di pasar ketenagalistrikan Indonesia. Reformasi pasar dilakukan dalam bentuk deregulasi. Hal ini dilakukan demi menciptakan kondisi pasar yang dapat dipandang suportif oleh pihak swasta. Deregulasi ini dituang dalam undang-undang ketenagalistrikan yang baru, yaitu UU Ketenagalistrikan No. 20 tahun 2002. Undang-undang ini membagi usaha penyediaan listrik ke dua bagian: bagian kompetitif, yaitu pembangkit dan penjualan, dan bagian non-kompetitif, yaitu transmisi dan distribusi.

Dengan demikian, pihak swasta didorong untuk masuk dalam usaha pembangkit dan penjualan listrik. Selain itu, tarif pembangkit dan penjualan listrik akan ditentukan berdasar prinsip kompetisi yang sehat dan diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Listrik yang bersifat independen, termasuk dalam mengimplementasikan kebijakan, penetapan tarif, dan pengawasan pasar.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia berniat melepas kekuasaan monopoli pasar ketenagalistrikan Indonesia. Dengan sistem kompetisi dan adanya badan pengawas yang bersifat independen, pihak swasta dapat merasa lebih terjamin untuk memperoleh laba yang sepatutnya, sesuai dengan pergerakan pasar dan tanpa perlu khawatir adanya resiko intervensi berlebihan dari pemerintah.

Namun, deregulasi ini tampaknya terlalu terburu-buru. Tak lama setelahnya, reformasi regulasi pasar ini ditolak. Pada 2004, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa UU Ketenagalistrikan No. 20 tahun 2002 telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 33 butir 2. Pasal ini menyatakan bahwa bidang produksi yang vital bagi negara dan menyangkut hidup orang banyak harus dikontrol oleh negara. MK menyatakan bahwa substansi UU Ketenagalistrikan No. 20 tahun 2002 telah mendukung privatisasi usaha penyediaan listrik yang dianggap merupakan komoditas strategis yang mana hakekatnya menyangkut hidup banyak orang, sehingga harus dikontrol secara eksklusif oleh negara. Dengan demikian, UU Ketenagalistrikan No. 20 tahun 2002 pun dicabut dan diganti kembali oleh UU Ketenagalistrikan No. 15 tahun 1985.

Melalui peristiwa ini, dapat diasumsikan bahwa pasar ketenagalistrikan Indonesia tidak dapat mengadopsi sistem deregulasi yang berlebihan ke depannya karena adanya limitasi dari UUD 1945 sebagai dasar hukum Indonesia. Dengan demikian, reformasi regulasi pasar ketenagalistrikan Indonesia di masa depan sepertinya harus menempatkan pemerintahan Indonesia sebagai pemegang kendali utama pasar. Pada 1999 hingga 2004, tidak ada tender IPP yang diajukan.

Belajar dari pengalaman, pemerintahan tampaknya menyimpulkan bahwa jalan untuk mendorong investasi swasta dalam pasar ketenagalistrikan tanpa melanggar UUD 1945 adalah melalui kerangka kerjasama. Reformasi regulasi mulai dilakukan secara bertahap. Contoh: Peraturan Presiden (Perpres) No. 67 tahun 2005 menyatakan bahwa pihak swasta dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam pembangunan

infrastruktur listrik. Pihak swasta dapat mengajukan proposal pembangunan yang sifatnya bukan prioritas dan apabila disetujui, pihak swasta akan dikompensasi. Risiko dalam proyek kerjasama juga dialokasikan berdasarkan prinsip siapa yang paling sanggup, yang berarti dapat dilimpahkan ke negara.

Dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia membagikan sebagian kecil kuasa pasar ketenagalistrikan Indonesia kepada pihak swasta dalam bentuk kerjasama serta

memberikan komensasi dan jaminan demi mendorong investasi swasta.

Saat ini, pembangkit IPP atau hasil kerjasama telah tumbuh baik dengan kapasitas mencapai sekitar 23% dari total kapasitas pembangkit di Indonesia. Ke depannya, PLN berharap bahwa swasta akan berperan lebih besar dalam pembangunan pembangkit listrik demi mendorong pengembangan pasar ketenagalistrikan Indonesia.

Reformasi Regulasi Pasar Ketenagalistrikan Indonesia di Masa Depan

Badan Regulasi Inklusif

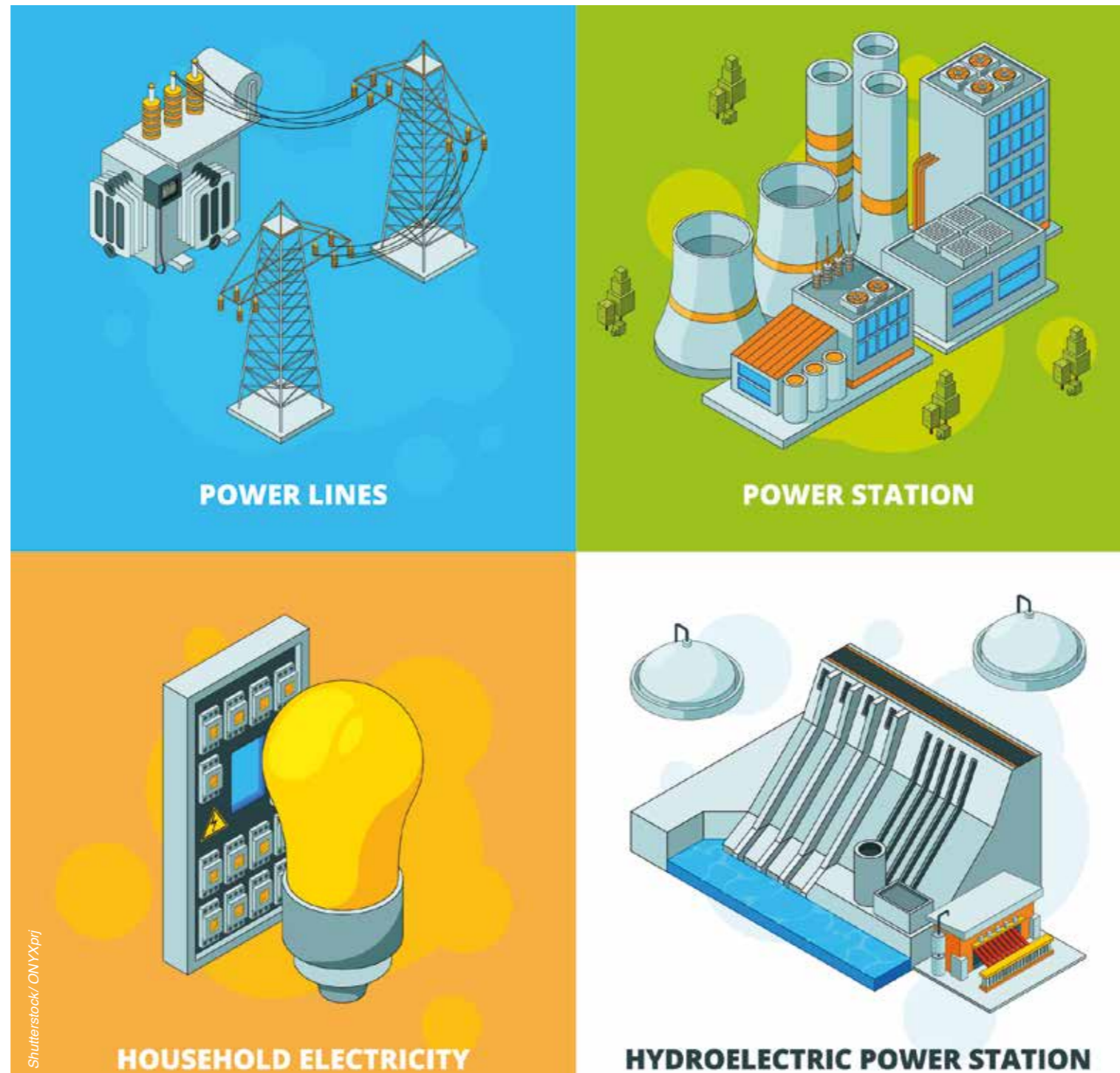
Para investor swasta diyakini akan lebih terjamin mendapat laba yang sepatutnya apabila ada badan regulasi yang bersifat independen. Namun, badan seperti ini tampaknya tidak mungkin didirikan dalam pasar ketenagalistrikan Indonesia, berkaca dari sejarah resistansi deregulasi pasar. Namun mungkin untuk mendirikan badan regulasi yang bersifat inklusif. Badan regulasi inklusif dapat memberikan peran lebih besar kepada swasta dalam formulasi regulasi pasar ketenagalistrikan Indonesia. Hal ini dapat dipersepsikan pihak swasta sebagai kondisi pasar yang suportif.

Pasar ketenagalistrikan Australia, atau disebut NEM, memiliki badan regulasi yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam mendirikan badan regulasi inklusif. Australian Energy Market Commission (AEMC) bertugas membuat regulasi sekaligus mengembangkan NEM. Ketua AEMC berasal dari badan pemerintahan Australia, sedangkan salah satu komisionernya berasal dari swasta.

Kehadiran pihak swasta dalam komposisi AEMC mungkin mampu merepresentasikan pihak swasta dalam pasar secara lebih baik. Kembali ke pasar ketenagalistrikan Indonesia, badan regulasi inklusif dapat meminimalisir risiko politik dalam pasar yang pada saat ini regulasinya dikontrol ketat oleh pemerintah. Keadaan pasar ketenagalistrikan Indonesia ke depannya juga dapat lebih kuat menahan pengaruh pergantian rezim.

Di lain sisi, pemerintah Indonesia juga perlu memiliki kuasa intervensi dalam badan regulasi ini. Hal ini penting demi memenuhi ketentuan UUD 1945. Namun, kuasa intervensi tersebut tidak boleh disalahgunakan supaya badan regulasi tidak kehilangan kredibilitasnya.

Pada 1996, pemerintah Hungaria menggunakan kuasa intervensi yang berlebihan untuk menurunkan harga listrik. Saat itu, badan regulasi mengusulkan



sebaliknya, yaitu harga listrik harus naik. Pada akhirnya, terjadi litigasi dari beberapa produsen listrik.

Dalam perumusan kuasa intervensi, Indonesia dapat mencontoh Australia yang memiliki butir hukum untuk kuasa intervensi pemerintah dalam kasus khusus. Emergency Management Act 2004 memberikan kuasa bagi menteri energi negara bagian South Australia (SA) untuk mengumpulkan informasi yang menentukan kemungkinan terjadinya kondisi darurat penyediaan listrik di SA. Dengan basis yang masuk akal, menteri dapat mendeklarasikan kondisi darurat lalu memerintah para peserta pasar untuk merespon kondisi darurat tersebut, termasuk operator pasar listrik Australia yang bersifat independen, yaitu Australian Energy Market Operator (AEMO). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih mampu memiliki kuasa intervensi meskipun badan regulasi telah bersifat independen.

Bagaimanapun, badan regulasi inklusif mungkin dibutuhkan di pasar ketenagalistrikan Indonesia saat ini. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini memiliki catatan kinerja yang kurang baik. Mereka tidak berhasil merumuskan satupun dari sembilan rancangan undang-undang energi selama empat tahun terakhir, yang salah satunya berkaitan dengan revisi UU ketenagalistrikan. Tampaknya tidak ada informasi umum yang jelas mengenai alasan kurangnya performa mereka. Dengan kehadiran swasta dalam badan regulasi, adalah mungkin terjadinya diskusi yang lebih aktif serta berujung pada perumusan regulasi yang lebih efektif, yang pada akhirnya mampu menarik lebih banyak investasi swasta bagi pasar ketenagalistrikan Indonesia.

Mekanisme Banding Regulasi yang Jelas dan Transparan

Saat ini, Indonesia memiliki Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) yang mewadahi para IPP serta berfungsi sebagai forum antara IPP dan pemerintah. Namun, tampaknya tidak ada informasi umum yang jelas mengenai sejarah kinerja APLSI, serta bagaimana pelaksanaan forumnya. Hal ini sangat kontras dengan kondisi di Australia. AEMC mempublikasikan seluruh banding regulasi

dalam NEM, dilengkapi dengan dokumen terkait, status pemohon, dan status bandingnya. AEMC mengizinkan setiap pihak, hingga ke level individu, untuk mengajukan banding. AEMC juga menyajikan panduan pengajuan banding.

Jika Indonesia menganut prinsip serupa bagi pasar ketenagalistrikannya, minat para investor swasta akan lebih terdorong. Pembentukan mekanisme banding regulasi yang jelas dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan investor swasta terhadap pasar ketenagalistrikan karena diakuinya dan tercatatnya peran mereka dalam memengaruhi kondisi pasar. Publikasi hasil banding dapat menunjukkan efektivitas perkembangan regulasi pasar. Selain itu, jejak mekanisme banding yang jelas dan positif mampu meningkatkan kepercayaan para investor swasta untuk berinvestasi lebih di pasar ketenagalistrikan Indonesia.

Penyediaan Informasi Pasar yang Lebih Layak

Sebagai perusahaan listrik nasional, PLN memberikan informasi pasar ketenagalistrikan Indonesia yang tertuang dalam laporannya setiap tahun. Namun, sepertinya informasi tersebut masih kurang bernilai. Contohnya, PLN menampilkan daftar pembangkit dalam proyek Fast-Track-Programme (FTP) 1 tetapi tidak ada informasi siapa pemiliknya. PLN juga menampilkan daftar proposal pembangkit pada FTP 2 tetapi tidak ada informasi siapa yang mengikuti lelangnya. PLN juga tidak menyediakan informasi yang cukup jelas tentang perkembangan program 35GW seperti, lokasi pembangkit, valuasi proyeknya, pelaksana proyek, tipe pembangkit, dan sebagainya. Situasi ini kembali lagi kontras dengan Australia. AEMO menyediakan informasi bagi publik yang komprehensif dan rapi mengenai kondisi NEM, contoh: perusahaan pemilik pembangkit, perusahaan yang mengajukan proposal, tipe pembangkit yang diajukan, lokasi pembangkit, dan lain sebagainya.

Dengan informasi yang mumpuni, seorang investor dapat lebih mengerti kondisi pasar yang akan dimasukinya. Jika PLN memberikan penyediaan informasi yang lebih layak, para investor swasta dapat menangkap lebih baik prospek pasar ketenagalistrikan



Indonesia. Para investor swasta mungkin akan mengambil kesempatan investasi yang sebelumnya tidak berani mereka lakukan karena keburaman pasar.

Belum lama ini, Presiden Direktur PLN ditangkap karena tuduhan menerima gratifikasi pada salah satu proyek pembangkit batu bara. Jika pasar lebih transparan, tampaknya akan lebih sedikit juga kesempatan untuk berlaku curang dalam pasar. Para investor swasta juga akan merasa lebih nyaman menambah investasi dalam pasar ketenagalistrikan Indonesia.

Belajar dari Sejarah

Pasar ketenagalistrikan Indonesia tampaknya memiliki banyak jalan untuk mereformasi regulasinya demi mendorong investasi yang lebih besar dari pihak swasta. Pemerintahan dapat berefleksi dari sejarah reformasi regulasi pasar ketenagalistrikan Indonesia serta mengamati penerapan regulasi pasar ketenagalistrikan di negara lain. Hal ini demi membentuk kondisi pasar yang lebih suportif bagi

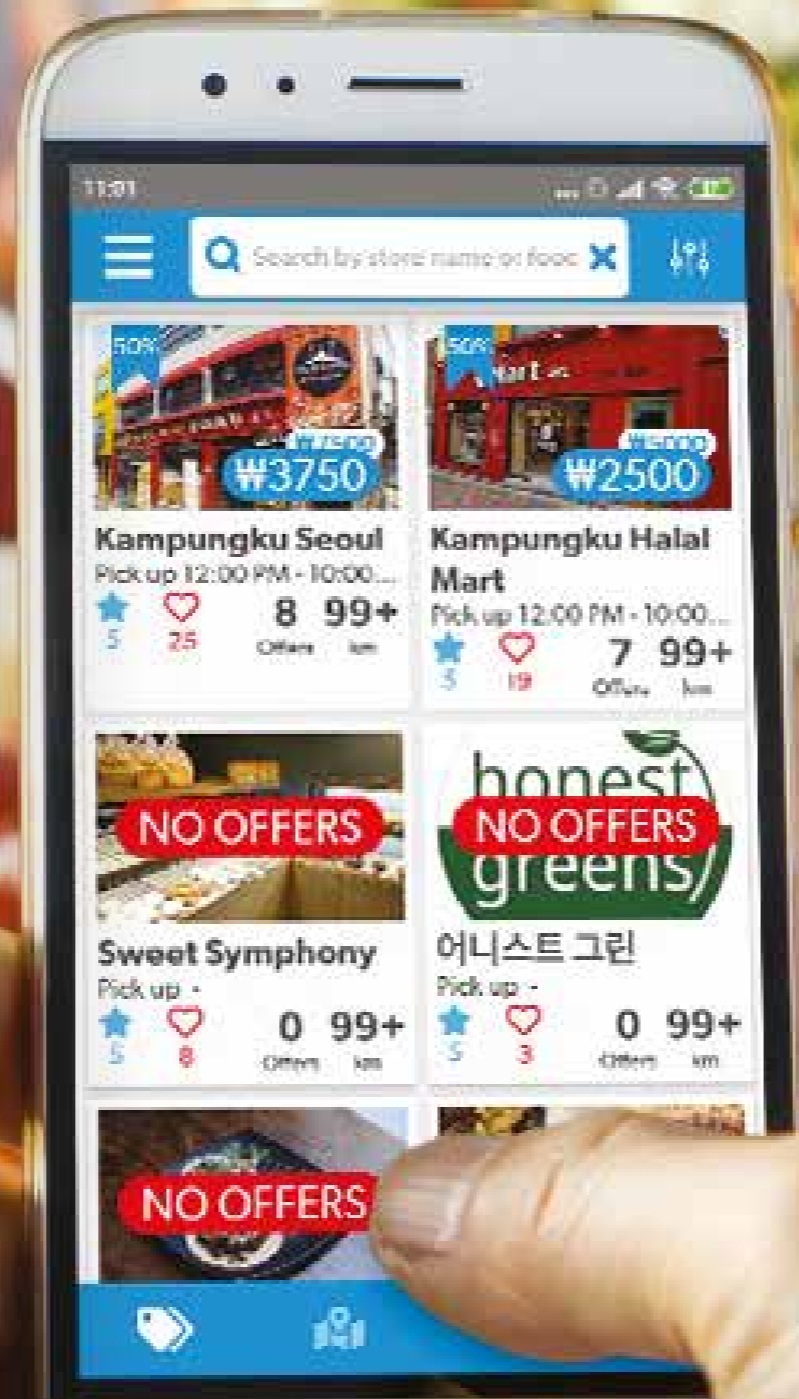
pihak swasta. Kondisi pasar yang lebih suportif bagi pihak swasta akan meningkatkan kepercayaan para investor swasta untuk berinvestasi lebih banyak di pasar ketenagalistrikan Indonesia.

Dengan demikian, pasar ketenagalistrikan Indonesia dapat memperoleh investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan pasarnya. Pada akhirnya, pasar ketenagalistrikan Indonesia dapat berkembang pesat untuk berdaya saing di ASEAN.

Alvin Lianto

*Dean's Honours List 2018,
the University of Melbourne*

KALAU ADA KELEBIHAN MAKANAN, DI-DAMOGO-IN AJA



Shutterstock/ Darryl Fung

Sampah masih menjadi masalah besar di Indonesia. Bahkan untuk sampah makanan, Indonesia menempati posisi kedua produsen sampah makanan terbesar di dunia setelah Arab Saudi. Ironisnya, masih ada rakyat negeri kita yang kekurangan makanan.

Hal tersebut yang mendorong pemuda kelahiran 6 Desember 1995 asal Bantul, Yogyakarta yang kini tinggal di Korea Selatan, Muhammad Farras, membangun DamoGO bersama kawannya. DamoGO adalah startup sosial yang berfokus untuk mengurangi limbah makanan di restoran dan retail makanan di Korea Selatan. Misi DamoGO, menurut lulusan Teknik Sipil, Arsitektur dan Lingkungan Korea University adalah untuk menciptakan gerakan nasional untuk mengurangi sampah makanan sambil tetap menyediakan makanan enak untuk semua orang.

DamoGo menyediakan *platform* bagi para pelaku bisnis untuk menjual makanan yang tidak habis terjual atau hampir *expired* dengan harga yang lebih murah kepada para pembeli yang terhubung dengan DamoGO.

Sejak peluncurannya pada April 2019, DamoGO telah bekerja sama dengan 80 restoran dan hotel di Korea Selatan. Aplikasi ini telah diunduh sebanyak 550 kali dengan pengguna sebanyak 400 orang. DamoGo juga sudah menyelamatkan 800 porsi makanan.

Farras memang kian sibuk. Tetapi ia bersedia meluangkan waktu bertemu dengan Tim Majalah Masyarakat ASEAN pada bulan Juni 2019 yang lalu. Ia bercerita awal mula dan perkembangan DamoGO. Berikut petikannya:

Bagaimana awal terbentuknya DamoGO?

Berawal pada September 2017, pada saat *midterm* kampus. Ketika lagi stres menghadapi ujian, saya dan teman-teman pesan makanan (pizza) dan kebanyakan. Lalu kami kepikiran, sisa makanan tersebut mau diapakan. Teman bilang, simpan saja di kulkas atau

dibuang. Tapi kan sayang kalau dibuang. Kalau dibagi-bagikan ke orang atau dijual dengan harga murah bagaimanakah? Setelah keliling asrama, akhirnya pizza itu habis juga walaupun kami rugi karena dijual dengan harga murah. Waktu itu mulai terpikir apakah ini jadi masalah saya saja atau juga masalah teman-teman yang lain. Saya kemudian *browsing* masalah sampah makanan di Indonesia dan Korea Selatan. Saya kaget hasilnya. Dari situlah proyek DamoGO dimulai.

Bagaimana DamoGO ini bisa dapat pendanaan?

Saya, senior orang Mongolia, dan satu orang Korea Selatan bernama Lin Hwang, ikut kompetisi *startup*

Asia Timur dan kami berhasil masuk semifinal. Padahal saat itu belum ada proposal dan aplikasi. Kami hanya mengirimkan *pitchdeck*. DamoGO adalah satu dari tiga startup termuda yang masuk semifinal. Kami baru kerjakan proyek ini selama dua minggu dan sudah masuk semifinal. Semisal dikerjakan lebih lama, bagaimana hasilnya.

Lalu, bagaimana perkembangannya?

Pada November 2017, teman kami orang Mongolia meninggalkan tim karena urusan pribadi. Kami berdua terus jalan dan melakukan riset selama sekitar 1 tahun, dari September 2017-Juni 2018. Riset kami

berhubungan dengan *policy*-nya, apakah bisa mendonasikan makanan dan apakah boleh menjual makanan yang hampir *expired*.

Puncaknya pada Juni 2018 kami ikut kompetisi oleh *Seoul Global Centre* dan mendapat juara satu. *Reward*-nya adalah kami mendapat *free office* selama 1 tahun di *Seoul Global Centre*. Dari situlah kami mulai mendapat banyak tawaran dari para investor. Kami dapat *funding* pada awal September 2018 sebesar US\$110.000 (sekitar Rp 1,7 miliar). Dan mulailah kami mengerjakan aplikasi dan *website* DamoGo. Aplikasi di Google Play dan App Store diluncurkan pada 29 April 2019.

Apakah ada kompetisi lain yang dimenangi DamoGO?

Pada Desember 2018, kami mendapat penghargaan *Outstanding Performer* dari *Markeeters*. Setelah itu, kami masuk dalam TOP 5 Jakarta Smart City Startup pada Regional Investment Forum pada Maret 2019. Juni 2019, DamoGO menjadi finalis *Demo Day* dari HITEJINRO. Juli 2019, kami menjadi finalis pada Global Entrepreneurs Foundation (GEF). Agustus 2019 kami rencananya juga akan menerima penghargaan dari *World Bank*.





Dok. Pribadi

mengurusi startup. Seluruh informasi terkait startup ada di *website* mereka, mulai dari informasi kompetisi start-up, *event*, semua tersedia dan mudah dicari.

Apa proyek DamoGO saat ini?

Sekarang kami dalam proses kerja sama dengan Wali Kota Seoul untuk mengaplikasikan DamoGO ke seluruh Seoul. Kami juga sudah bertemu dengan desainer kota Pemerintah Kota Songdo, Incheon, untuk mengaplikasikan DamoGO. Proyek-proyek tersebut paling cepat terlaksana pada Agustus 2019. Selain itu, DamoGO juga sudah bekerja sama dengan Club Chamber of Commerce France-Korea Selatan, satu *club* dengan Air France, KLM dan Cartier. Apabila ada kegiatan di salah satu klub, DamoGO akan *stand by* dan siap untuk *rescue* makanan. Ke depannya juga ada rencana untuk mengembangkan DamoGO ke ASEAN karena memang negara ASEAN termasuk negara dengan sampah makanan yang tinggi.

Tadi Anda menyebut Jakarta Smart City. Apakah akan ada kerja sama dengan Pemerintah Kota Jakarta?

Jakarta telah memiliki *Jakarta Smart City Program 2030*. Top 5 *Start-up* yang menang di *Regional Investment Forum* diminta terlibat dalam menjadikan

Jakarta sebagai kota pintar. DamoGO juga telah bertemu dengan Pemerintah Kota Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka berencana untuk mengembangkan DamoGO ke seluruh Jawa Tengah dan Yogyakarta. Bagi Pemerintah, DamoGO dapat memberikan keuntungan. Keuntungan ini dapat diperoleh melalui kerja sama *business-to-business* atau juga *business-to-government*.

Keuntungan bagaimana?

Sebagai contoh pada 2012-2017, Wali Kota London bekerja sama dengan sebuah startup dengan tujuan untuk mengurangi sampah makanan di Kota London. Menariknya, setelah lima tahun investasi, setiap US\$1 yang mereka investasikan dapat menghemat hingga US\$92 biaya pengelolaan sampah makanan. Restoran-restoran yang bekerja sama dengan DamoGO juga mengalami penurunan jumlah sampah makanan sebanyak 15-20 persen.

Rencana DamoGO ke depan?

Kami ingin agar DamoGO menjadi *customer centric project* (proyek yang fokus pada konsumen). Kami ingin menjadi perusahaan dengan *brand* yang kuat dan *sustainable*. Kalau ada kelebihan makanan, di-DamoGO-in aja.

Kalau ada anak-anak muda ingin memulai startup, apa yang ingin Anda sarankan?

Harus idealis dan keras kepala. Karena ketika memulai menjalankan suatu ide, bisa jadi akan ada orang-orang yang tidak setuju, semisal orang tua, keluarga atau pacar. Di saat itulah komitmen kalian diuji, mau melanjutkan proyek atau tidak. *Looking back*, GoJek itu butuh waktu lima tahun sebelum mulai dikenal orang. Ruang Guru butuh waktu tiga tahun. Asal ada kemauan dan komitmen serta kerja keras, semua bisa dilakukan.

Tantangan selama ini apa saja?

Tantangan dan kesulitan kalau aku simpulkan ada tiga. Pertama karena bisnis model termasuk baru di wilayah Asia, pengelolaan restoran menjadi tantangan untuk kami yaitu untuk merubah kultur restoran dalam mengelola *food waste*.



Dok. Pribadi

Korea Selatan sudah sangat maju di bidang teknologi dan industri. Apa kelebihan membangun startup di Korea Selatan?

Yang dirasa paling nyaman itu ketika distribusi, dari mulai *packaging* dan transportasi. *Tax deduction* juga dilakukan secara otomatis. Semua formulir telah tersedia dan tinggal dimasukkan ke *website*. Selain itu, di Korea Selatan ada Kementerian yang khusus

Yang kedua dari segi *angle of marketing*. Karena DamoGo *deal* dengan *food waste*, kami harus menjadi ekstra hati-hati dalam memasarkan produk. Kami tidak ingin *customer* merasa membeli makanan sisa dari kami.

Ketiga kekurangan human power, yuk makannya gabung sama project kita di www.damogo.co.kr

Anda optimistis dengan startup di Indonesia?

Sebenarnya di Indonesia banyak startup muda yang berpotensi, tapi tidak ada badan khusus yang mengatur. Seandainya terdapat badan sentral yang menangani semua startup, kemungkinan jumlah unicorn di Indonesia bisa lebih banyak lagi.

Fransisca Dian Putri

Fungsional Diplomat

Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN





IDENTITAS ASEAN: MEMBUMIKAN ASEAN DI AKAR RUMPUT

Setelah lebih dari 50 tahun ASEAN dibentuk, dan sejak ditandatanganinya Bali Concord II pada 2003, teretuslah pemikiran agar ASEAN menjadi masyarakat yang saling peduli dan mempromosikan identitas bersama. Keinginan untuk memiliki satu identitas ASEAN diperjelas kembali melalui moto ASEAN yakni One Vision, One Identity, One Community yang mulai digaungkan sejak 2005. Meski banyak dokumen ASEAN yang menyampaikan terminologi identitas ASEAN (*ASEAN Identity*), belum ada dokumen yang mendefinisikan dan diadopsi secara resmi oleh ASEAN mengenai identitas ASEAN. Penjelasan mengenai identitas ASEAN dapat memperkuat kehadiran ASEAN di masyarakat, tidak hanya di tataran elite.

Pendefinisian identitas ASEAN sangat penting dilakukan. Mengingat Yogyakarta merupakan ASEAN City of Culture untuk periode 2018-2020 dan Indonesia menjadi ketua ASEAN Ministerial Meeting on Culture and Arts (AMCA), identitas ASEAN adalah implementasi tema keketuaan Indonesia yaitu “Embracing the Culture of Prevention to Enrich ASEAN Identity”. Setelah narasi identitas ASEAN dirumuskan oleh pakar-pakar di Indonesia, selanjutnya akan disampaikan di berbagai pertemuan ASEAN dengan harapan dapat disetujui dan menjadi dokumen rujukan bagi ASEAN.

Guna menjadikan identitas ASEAN sebagai terminologi dengan definisi yang dipahami seluruh kalangan, Indonesia memiliki inisiatif memperkenalkan dan

merumuskan definisi tersebut dengan membentuk focus group discussion (FGD). Definisi identitas ASEAN diharapkan dapat menjadi dokumen rujukan bagi semua negara ASEAN ketika membahas identitas ASEAN.

Focus Group Discussion Tentang Mendefinisikan Identitas ASEAN

FGD diselenggarakan dua kali, yakni pada 28 Februari-1 Maret dan 18-19 Juni 2019 di Yogyakarta. FGD mengundang akademisi dan cendekiawan di bidang budaya, sejarah, sosial politik, dan teknologi dari Indonesia dan Filipina.

Para akademisi dan cendekiawan tersebut menyampaikan pandangannya mengenai apa yang dimaksud dengan identitas serta urgensi ASEAN merumuskan identitasnya. Para narasumber sepakat pentingnya menentukan identitas ASEAN, karena identitas adalah jati diri yang membedakan seseorang menjadi bagian dari sebuah komunitas atau bukan. Sejatinya, identitas tidak dapat lepas dari stereotip tentang orang tersebut yang melekat seiring dengan

berjalannya waktu. Dengan dikenalnya dua konsep identitas, yakni identitas Asia Tenggara dan identitas ASEAN, perlu dikaji kembali maksud dari identitas ASEAN, karena pada hakikatnya ASEAN dibentuk secara politis. Identitas memiliki *common shared values* (nilai-nilai yang dianut bersama) yang memungkinkan untuk bertindak bersama dan melindungi kawan dari pihak luar.

Secara historis, nilai-nilai Asia Tenggara pada dasarnya mendapatkan pengaruh dari bangsa India dan Tiongkok. Kedua bangsa tersebut memiliki budaya yang kuat sehingga dapat menyebar ke berbagai kawasan di sekitarnya, termasuk wilayah Asia Tenggara. Akulturasi kedua budaya tersebut yang pada akhirnya merumuskan nilai-nilai yang dianut masyarakat di Asia Tenggara. Pada dasarnya, nilai-nilai keragaman yang dianut Asia Tenggara berbeda dengan konsep yang dianut di Eropa, karena bangsa Eropa menciptakan nilai-nilai yang dibentuk secara internal, seperti bangsa Yunani dan Romawi kuno.

Narasumber setuju, dalam menentukan identitas bersama, identitas tersebut harus bersifat umum dan dapat diterima oleh seluruh negara anggota ASEAN. Identitas dapat diciptakan sebagai hasil konstruksi bersama ataupun gambaran dari orang lain melalui komunikasi, dialog, dan membentuk kesepakatan antar negara anggota ASEAN. Tantangan yang dihadapi dalam membentuk identitas ASEAN adalah adanya instabilitas domestik yang dapat mempengaruhi dan mengancam keutuhan dan identitas regional, masih adanya mata rantai yang hilang (*missing link*) antara para pembuat kebijakan ASEAN dan masyarakat ASEAN, sengketa antar negara anggota ASEAN, dan rivalitas atau kompetisi di antara negara ASEAN.

Para narasumber juga setuju bahwa ASEAN Way sebagai prinsip-prinsip yang dianut oleh ASEAN dapat menjadi salah satu sumber dalam membentuk identitas ASEAN. Identitas ASEAN dapat diciptakan dari apa yang sudah diwarisi oleh ASEAN sejak dulu atau dengan cara mengkonstruksikan pemikiran mengenai identitas baru. Tidak dapat dipungkiri bahwa kedekatan secara geografis memainkan peran yang besar dalam menentukan suatu identitas.

Narasi Identitas ASEAN

Dalam perumusan narasi identitas ASEAN telah disampaikan bahwa identitas ASEAN adalah proses konstruksi sosial dengan kombinasi yang seimbang antara nilai-nilai yang dikonstruksikan (*constructed values*) dan nilai-nilai yang diwarisi sejak dulu (*ascribed inherited values*) yang pada akhirnya akan membawa masyarakat ASEAN dari *gesellschaft* (patembayan) menjadi *gemeinschaft* (paguyuban).

Konsep *gesellschaft* adalah masyarakat yang terikat secara parsial, yang mana berdasarkan pendekatan pragmatis lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan regional. Sedangkan konsep *gemeinschaft* adalah konstruksi sosial yang menggabungkan masyarakat berdasarkan nilai-nilai bersama dan keterikatan kekeluargaan.

Ada dua nilai yang dapat ditentukan dalam identitas ASEAN, yakni nilai-nilai yang dikonstruksikan

(*constructed values*) dan nilai-nilai yang diwarisi sejak dulu (*ascribed inherited values*). nilai-nilai yang dikonstruksikan (*constructed values*) yang dimaksud berdasarkan pasal 2 dari Piagam ASEAN terkait dengan prinsip-prinsip, yakni respek, keamanan dan perdamaian, kesejahteraan, non-intervensi, konsultasi, tunduk pada hukum internasional, demokrasi, promosi dan perlindungan hak asasi manusia, Bhinneka Tunggal Ika, inklusivitas, ASEAN Centrality dalam berhubungan dengan pihak luar.

Nilai-nilai yang dikonstruksikan (*constructed values*) diharapkan dapat menjadi gambaran terhadap ASEAN sebagai entitas yang unik di Global Community of Nations, tunduk pada hukum internasional dan masyarakat internasional serta dimana masyarakat ASEAN seharusnya dapat mengasosiasikan dirinya dan bangga menjadi bagian dari masyarakat yang diakui oleh pihak luar.

Sedangkan konsep nilai-nilai yang diwarisi sejak dulu (*ascribed inherited values*) didefinisikan sebagai nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat yang tinggal di Asia Tenggara, yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Tradisi, kebiasaan dan kepercayaan sejak zaman pra-sejarah merupakan fondasi dari bercampurnya etnis masyarakat di Asia Tenggara. Pada era kerajaan kuno sampai dengan abad penemuan, interaksi dan konstruksi sosial masyarakat dipicu oleh beberapa kegiatan, yakni misionaris dan perdagangan, khususnya dengan kedatangan pedagang dari luar negeri. Kawasan Asia Tenggara lebih reseptif terhadap

budaya asing seperti dari Tiongkok, India, Timur Tengah, dan Eropa. Sehingga tidak dapat dimungkiri bahwa DNA masyarakat Asia Tenggara berasal dari hasil akulturasi. Karena itu, masyarakatnya majemuk dan menghargai keberagaman. Akulturasi membentuk nilai-nilai seperti spiritualisme, kekeluargaan, komunalisme, kolektivisme, toleransi, harmoni, dan solidaritas.

Pembentukan identitas ASEAN diharapkan dapat menciptakan Imagined ASEAN Community, yang memiliki tujuan akhir sebagai pembentukan proses masyarakat ASEAN; sebuah komunitas yang terikat dengan nilai-nilai yang mendorong masyarakat ASEAN berpandangan secara seimbang antara kepentingan nasional dan regional. Di dalam Imagined ASEAN Community, masyarakat ASEAN akan memiliki pemahaman dan kebanggaan menjadi bagian dari ASEAN. Adapun parameter dalam mengukur kesuksesan identitas ASEAN adalah dengan tiga hal, yakni Kesadaran ASEAN (The ASEAN Awareness), Relevansi ASEAN (The ASEAN Relevance), dan Kebanggaan ASEAN (The ASEAN Pride).

Way Forward

Guna menyukseskan narasi identitas ASEAN sebagai referensi utama, diperlukan diseminasi narasi tersebut kepada berbagai *stakeholders*, termasuk ke berbagai pertemuan ASEAN di tiga pilar ASEAN dan kemungkinan pengarusutamaan konsep identitas ASEAN berdasarkan cakupan pekerjaan badan sektoral. Narasi identitas ASEAN telah disampaikan di dalam Pertemuan ke-15 Pejabat Tinggi ASEAN di Bidang Seni

dan Budaya (ASEAN 15th Senior Officials Meeting on Culture and Arts/SOMCA) pada 10 September 2019. Seluruh negara ASEAN menyetujui konsep dari narasi tersebut. Selanjutnya mendiseminasikan narasi tersebut ke Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organisations/CSO) yang tercantum dalam *list annex 2* dari Piagam ASEAN dan CSO pada umumnya agar narasi tersebut dapat bersifat inklusif ke semua pihak. Setelah narasi tersebut sampai di tahap para pemimpin ASEAN dan diadopsi, akan diarahkan untuk membentuk dokumen-dokumen pendukung pengimplementasian narasi identitas ASEAN.

Tidak dapat dimungkiri masyarakat di Asia Tenggara tidak dapat lepas dari identitasnya sebagai warga dari salah satu negara di kawasan tersebut. Namun masyarakat di kawasan Asia Tenggara perlu mengingat bahwa mereka merupakan bagian dari suatu yang lebih besar, yakni memiliki identitas di tingkat kawasan. Masyarakat di Asia Tenggara dapat dicerdaskan dengan memperkenalkan mereka mengenai ASEAN sebagai wadah rukun tetangga yang majemuk namun saling melengkapi. Pendefinisian identitas ASEAN diharapkan dapat menjadi pemicu bagi masyarakat agar dapat mengakui dan merasakan dampak yang luar biasa dari kebersamaan ASEAN.

Fadilla Rahmatan Putri

Fungsional Diplomat

Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN



Shutterstock/ Natthapon Chinon

“Orang Indonesia biasa menyebut Bekantan dengan sebutan Monyet Belanda, karena hidungnya yang panjang dan perutnya yang buncit.”

“BERBURU” BEKANTAN DI HUTAN MANGROVE

Shutterstock/ Dicky Asmoro

Pagi itu, kami mulai khawatir. Hujan sempat turun dengan deras. Cuaca di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam memang seperti kurang bersahabat. Padahal hari itu, 2 Juli lalu, kami, delegasi Indonesia pada Pertemuan ke-23 Dialog ASEAN-Korea Selatan (Republic of Korea) telah berencana mengikuti Tur Mangrove (Bakau) untuk melihat langsung bekantan (Proboscis monkey) di habitat alaminya di hutan mangrove yang berada di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

Beruntung, ketika siang menjemput, langit mulai terang. Kami pun berangkat menuju hutan mangrove dengan menaiki perahu dari Kampong Ayer (Kampung Air), daerah yang merupakan asal pusat kota Bandar Seri Begawan. Di kawasan ini, banyak rumah-rumah panggung yang berdiri di atas Sungai Brunei Darussalam.

Selama 45 menit perjalanan kami melihat di kiri kanan pohon bakau yang tumbuh dengan alami. Tak lama kapal kecil yang kami tumpangi berhenti. Pemandu wisata kami, Pigeon, membawa kami ke salah satu rumah penduduk. Kami pun rehat sejenak. Di sana, kami mencicipi kudapan manis khas Brunei dan secangkir teh hangat.

Setelah puas menikmati beragam jajanan, kami melanjutkan perjalanan ke hutan mangrove. Di Brunei Darussalam, sekitar 70 persen wilayahnya masih berupa hutan tropis dan sebagian besar berada di wilayah selatan.

Tak lama mengarungi sungai, pengemudi kapal kami tiba-tiba mematikan mesin dan berkata, “ada buaya!” Kami langsung melihat ke arah yang dia tunjuk. Namun sayang, buaya itu terlampau jauh sehingga kami tetap tidak bisa melihatnya.

Bekantan yang menjadi tujuan kami tampaknya sedang tak ingin menampakkan diri ke para tamunya. Menurut Pigeon, memang sekarang ini sulit untuk bisa melihat bekantan secara langsung. Sudah tiga tahun ia menjadi pemandu wisata, baru beberapa kali saja ia melihat binatang hutan tersebut.

Pigeon juga menceritakan hal-hal menarik tentang bekantan. Untuk bekantan jantan, semakin besar hidungnya, maka suaranya akan semakin berat, yang menandakan semakin tampan hewan tersebut. Bekantan jantan berukuran lebih besar dari betina dengan berat 22-24 kilogram dengan tinggi mencapai 75 sentimeter. Sementara bekantan betina berukuran sekitar 60 sentimeter dengan berat sekitar 12 kilogram.

Kami mulai masuk ke wilayah hutan *mangrove* lebih dalam lagi. Tiba-tiba, pengemudi kapal mematikan mesin dan berkata: "Itu di atas!". Kami langsung melihat ke atas dan melihat dua ekor bekantan kecil tengah makan dedaunan muda di atas pohon.

Kami segera beraksi dengan kamera dan telepon pintar untuk mengambil gambar mereka. Sayangnya, kedua bekantan tersebut terlalu tinggi sehingga foto yang kami hasilkan kurang memuaskan. Sekitar 10 menit mengarungi sungai, pengemudi kapal kembali berkata: "Itu di depan banyak." Benar, kami melihat banyak bekantan berukuran kecil. Kali ini, mereka tidak di atas pohon, tapi di antara pohon-pohon.

Saat itu gerimis turun. Mungkin karena itu mereka tidak berada di atas pohon. Tak kurang dari lima bekantan berukuran sedang tampak sedang duduk-duduk di bawah pohon. Beberapa saat kemudian, bekantan berukuran besar muncul dan bekantan-bekantan kecil pergi mengikutinya. Saya takjub. Belum lama Pigeon mengatakan susah untuk melihat satu saja bekantan, namun hari itu kami melihat lebih dari lima ekor.

Pigeon mengutarakan kekagetannya. Biasanya diperlukan waktu sekitar satu jam penuh untuk bisa melihat satu ekor bekantan. Namun kali ini dalam waktu 30 menit, kami melihat tujuh ekor sekaligus.

Ketakjuban kami belum juga menghilang ketika kami kembali. Esok harinya, kami mesti mewakili Indonesia dalam Pertemuan ke-23 Dialog ASEAN-Korea Selatan.

Fransisca Dian Putri
Fungsional Diplomat
Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN



Pohon Bakau Yang Tumbuh Alami

Dok. Pribadi



Rumah Panggung

Dok. Pribadi



Delegasi ASEAN
Bersiap Mengikuti Tour

Dok. Pribadi



Delegasi Dari ASEAN Menikmati
Pemandangan Sore

Dok. Pribadi

MENCICIPI KUDAPAN BRUNEI

Perburuan bekantan di hutan *mangrove* di Bandar Seri Begawan tak hanya membuat saya mengenal hewan ini. Saya juga mengenal beberapa kue negeri tetangga ini. Saat kami diajak rehat di sebuah rumah warga di tengah perjalanan tur, saya mencicipi beberapa kue.

Kue pertama yang saya coba adalah Kuih Ardam. Kue yang kalau di Indonesia disebut kue cincin ini terbuat dari campuran tepung beras, gula merah dan kelapa tua. Rasanya sangat manis. Menurut seorang kawan warga Indonesia yang tinggal di Brunei Darussalam, makanan Brunei memang cenderung lebih manis untuk lidah orang Indonesia.

Selanjutnya saya tertarik untuk mencoba jajanan yang mirip sekali dengan jajanan yang biasa saya temukan di



Kue Ardam

Dok. Pribadi

rumah nenek buyut di Ambarawa, kue bolu. Sementara di Brunei disebut kuih bahu. Rasanya pun persis sama dengan yang kue bolu yang biasa saya makan di Ambarawa. Bolu manis dicelupkan ke teh hangat tanpa gula membuat saya rindu kampung halaman.

Terakhir ada satu jajanan yang belum pernah saya lihat sebelumnya di Indonesia, yakni kuih celurut. Kue ini terbuat dari tepung beras, santan dan gula, dibungkus dengan *janur* (daun kelapa). Rasanya mirip sekali dengan nagasari tanpa pisang. Saya paling suka kuih celurut ini. Belakangan saya tahu bahwa kue tersebut juga ada di Indonesia, kue celorot atau jelurut. Ternyata kue Brunei mirip-mirip, atau bahkan sama saja hanya beda nama, dengan kue Indonesia.

Fransisca Dian Putri
Fungsional Diplomat
Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN



Kue
Celurut

Kue
Bahulu

Dok. Pribadi

Dok. Pribadi

PESONA HANGZHOU DARI LEGENDA ULAR PUTIH HINGGA ALIBABA

Suasana West Lake di malam hari.

Baru-baru ini delegasi dari seluruh negara ASEAN, termasuk saya, berkesempatan untuk berkunjung ke Hangzhou, Tiongkok untuk menghadiri rangkaian pertemuan ke-28 ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea (JWG-DOC), pertemuan ke-17 ASEAN-China Senior Officials' Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea (SOM-DOC) dan pertemuan ke-25 ASEAN-China Senior Officials' Consultation (ACSOC). Seluruh rangkaian pertemuan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kerja sama ASEAN-Tiongkok.

JWG-DOC dan SOM-DOC adalah pertemuan tingkat *working group* dan tingkat *senior officials* yang mengagendakan pembahasan perkembangan kerja sama maritim ASEAN-Tiongkok serta implementasi Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea (DOC) untuk mendorong terciptanya situasi kondusif di Laut China Selatan. Kedua pertemuan tersebut juga akan kembali melanjutkan negosiasi substansi dari draft *Code of Conduct* (COC) ASEAN-Tiongkok di LCS. Sedangkan pertemuan ACSOC merupakan pertemuan pada tingkat *senior officials* untuk membahas arah kerja sama kemitraan strategis ASEAN-Tiongkok dan persiapan pertemuan Tingkat

Menteri ASEAN-Tiongkok (PMC 10+1 Sessions with China) yang diselenggarakan pada akhir Juli 2019 di Bangkok, Thailand.

Sebagian besar milenial mengenal kota Hangzhou yang terletak di sebelah timur Republik Rakyat Tiongkok dan merupakan ibu kota Provinsi Zhejiang. Hangzhou dikenal sebagai markas dari salah satu raksasa *e-commerce* dan *fintech* di dunia saat ini, Alibaba. Namun, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa sebelum Alibaba berdiri, Hangzhou telah dikenal dunia melalui Legenda Ular Putih, sutra, dan teh hijau Longjing.

Legenda Ular Putih (White Snake Legend)

Cerita Ular Putih merupakan salah satu dari Empat Cerita Rakyat Tiongkok yang sangat terkenal tidak hanya di Tiongkok tetapi juga di dunia termasuk di negara-negara ASEAN. Kisah Ular Putih menceritakan mengenai seorang pria yang jatuh cinta dengan seorang wanita yang merupakan jelmaan dari seekor ular putih. Dikisahkan, seekor ular putih yang berutang budi pada seorang pemuda memutuskan menyampaikan terima kasihnya secara

langsung kepada sang pemuda dengan menjelma menjadi perempuan rupawan. Pertemuan keduanya menumbuhkan benih cinta hingga keduanya memutuskan untuk menikah dan hidup bersama.

Perjalanan cinta mereka ditentang seorang biksu Buddha bernama Fahai yang ternyata jelmaan dari kura-kura yang iri dengan keabadian dan kebahagiaan ular putih. Broken Bridge di West Lake, yang dikisahkan merupakan tempat pertemuan pertama siluman ular putih dalam wujud manusia dengan pria muda yang menjadi penolong hidupnya, dan Pagoda Leifeng di West Lake, yang menjadi tempat penyekapan ular putih oleh Fahai, menjadi obyek wisata dan spot foto paling terkenal untuk turis manca negara yang berkunjung ke Hangzhou.

Sutra

Hangzhou sejak dahulu dikenal sebagai penghasil sutra berkualitas tinggi yang diakui tak hanya di Tiongkok tetapi juga di seluruh dunia. Hangzhou merupakan salah satu dari delapan ibu kota kuno (*ancient capitals*) yang memiliki hubungan sejarah yang kuat dengan perkembangan desain dan teknik produksi sutera di Tiongkok. Menurut hasil temuan arkeologis yang diperkirakan berasal dari masa Dinasti Zhou atau sekitar 3400-2250 SM, para penduduk Hangzhou sudah terlibat dalam rangkaian produksi sutera mulai dari budi daya ulat sutera, penanaman pohon murbei yang merupakan pakan utama ulat sutera, menenun sutera hingga pembuatan alat-alat primitif untuk memproduksi sutera. Industri sutera di Hangzhou berkembang pesat dan mencapai puncaknya yang diperkirakan berlangsung pada Dinasti Song (960-1279 SM) dan membuat Hangzhou terkenal sebagai *home of silk* di Tiongkok dan dunia. Hingga kini, sutera dari Kota Hangzhou bersama dengan sutera dari Kota Suzhou yang berada di Provinsi Jiangsu memiliki reputasi sebagai sutera terbaik di dunia.

Untuk mengapresiasi kecintaan masyarakat Hangzhou terhadap sutera dan melestarikan berbagai peninggalan kebudayaan mengenai sutera, pemerintah Tiongkok mendirikan China National Silk Museum (Museum Sutra Nasional Tiongkok) di tepi West



Patung yang menggambarkan pertemuan pertama siluman ular putih dengan pria yang menolong hidupnya di Broken Bridge, West Lake, Hangzhou, RRT.

Lake, Hangzhou. Museum yang berdiri di atas lahan seluas 50.000 meter persegi ini dibuka untuk pertama kalinya pada 26 Februari 1992. Pada 2009, UNESCO secara resmi memasukkan museum ini ke dalam daftar World Heritage List atas kontribusinya dalam melestarikan budaya tekstil dan kostum dunia. Museum dipugar dan direnovasi besar-besaran pada 2016 untuk mempersiapkan pelaksanaan KTT G20 yang berlangsung di Hangzhou. Saat ini, China National Silk Museum tercatat sebagai museum tekstil dan kostum terbesar dan terlengkap di dunia, yang tidak hanya menampilkan *exhibit* dari sutera asal Tiongkok tetapi juga beragam tekstil dunia lainnya.

Teh Hijau Longjing

Di samping sutra, Hangzhou juga terkenal sebagai tempat kelahiran teh hijau Longjing atau dikenal juga sebagai Dragon Well Tea, yang merupakan teh hijau paling terkenal dan menempati peringkat pertama di antara 10 teh di seantero Tiongkok. Alkisah diceritakan bahwa pada masa Dinasti Qing (1611-1911 SM), ibunda kaisar jatuh sakit dan berhasil pulih setelah minum teh Longjing yang diseduh dan menghirup aromanya. Sejak itu, kaisar memberikan status teh

Longjing sebagai Imperial Tea. Saat ini, teh Longjing masih menjadi salah satu teh hijau pilihan untuk disuguhkan kepada tamu-tamu penting negara dalam acara kenegaraan di seantero Tiongkok.

Di sela pertemuan, saya berkesempatan menyusuri salah satu pusat souvenir tradisional di Kota Hangzhou. Saya menyaksikan sendiri cuplikan dari proses produksi Longjing Tea yang dilakukan secara tradisional, termasuk pengeringan dengan cara menyangrai daun di atas wajan tembaga yang panas yang kemudian diaduk secara berkala dengan mempergunakan telapak tangan (*pan-roasted*).

Menurut penduduk setempat, Longjing Tea berkhasiat membantu menurunkan berat badan karena memiliki konsentrasi anti-oksidan karekin yang tertinggi dibanding teh hijau lainnya. Menurut hasil penelitian, anti-oksidan karekin jika dikombinasikan dengan kafein akan mempercepat metabolisme tubuh manusia, khususnya membakar lemak secara sehat. Berkat reputasi dan kualitasnya yang telah teruji, harga jual eceran Longjing Tea autentik (bukan oplosan) terbelang paling mahal dibanding teh hijau jenis lainnya di Tiongkok.

Pagoda Leifeng



Alibaba

Delegasi negara ASEAN juga berkesempatan mengunjungi Corporate Campus Alibaba yang berada di dalam kompleks perkantoran Alibaba yang luas dan megah di Distrik Yu Hang, Hangzhou. Corporate Campus Alibaba merupakan pusat informasi yang terbuka untuk publik termasuk wisatawan manca negara yang ingin mengetahui sejarah pendirian, profil perusahaan, purwarupa produk-produk unggulan yang selalu dirotasi setiap minggunya dan cuplikan aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan Alibaba secara global. Para pengunjung juga berkesempatan melihat pencatatan secara *live* dari transaksi daring (*online*) yang dilakukan melalui Alibaba dan semua aplikasi yang dikembangkan Alibaba di seluruh dunia.

Alibaba yang dirintis dan didirikan di Hangzhou merupakan perusahaan multinasional asal Tiongkok yang didirikan oleh Jack Ma. Alibaba saat ini menyandang reputasi sebagai salah satu perusahaan multinasional besar dunia yang memiliki spesialisasi ritel dan *e-commerce* dari konsumen ke konsumen, bisnis ke konsumen dan bisnis ke bisnis yang berbasis internet dan *portal web*, yang dikenal generasi milenial melalui *Alibaba.com*, Taobao dan Tmall Alibaba juga berhasil mengembangkan cakupan usaha dan bisnisnya ke dalam sektor lainnya seperti inovasi dan pengembangan



Teh hijau Longjin dikeringkan dengan cara menyangrai daun di atas wajan tembaga panas dan diaduk dengan telapak tangan kosong (*pan-roasted*).

berbagai aplikasi untuk seluler, media digital, hiburan (*entertainment*), pengembangan dan operasional sistem pembayaran berbasis elektronik yang *cashless*, pelayanan mesin pencari belanja, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan layanan *cloud computing*.

Hosea Richardo Bokkac Manurung
Fungsional Diplomat
Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN

Perkebunan Teh Hijau Longjing di Hangzhou



Senior Officials ASEAN-RRT dalam kunjungannya ke Corporate Campus Alibaba di Distrik Yu Hang, Hangzhou



Bagian depan China National Silk Museum (Museum Sutera Nasional Tiongkok) di tepi West Lake, Hangzhou

Dermaga dan perahu wisata di West Lake Hangzhou





Dok: Pribadi

INDONESIA MENDORONG KOLABORASI DIPLOMASI DIGITAL DI ASIA-PASIFIK

Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi membuka Regional Conference on Digital Diplomacy (RCDD) di Hotel Mulia, Jakarta pada Selasa, 10 September 2019. Konferensi yang digagas oleh Indonesia ini menjadi suatu forum yang membahas peluang dan tantangan dalam menjalankan diplomasi di era digital serta pemanfaatannya secara maksimal dan efektif dalam berdiplomasi untuk kemajuan bangsa. Dua ratus peserta dari berbagai latar belakang menghadiri konferensi ini. Mereka berasal dari 16 negara di kawasan Asia Pasifik, yang terdiri dari sepuluh negara anggota ASEAN serta Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Selandia Baru.

Teknologi berpengaruh besar dalam praktik diplomasi.

Diplomasi, yang dahulu dilakukan melalui surat menyurat dan pertemuan, kini dipermudah melalui berbagai platform digital seperti media sosial. “Ketidakmampuan kita dalam mengikuti lompatan teknologi akan membuat kita tertinggal. Begitu juga dengan diplomasi. Bila tidak dapat menyesuaikan dengan transformasi yang cepat, diplomasi tidak akan relevan lagi. Itulah sebabnya sekarang ini saatnya kita menyanggah diplomasi dengan digital,” ujar Menteri Luar Negeri dalam sambutan pembukaannya.

Menteri Retno mengatakan ada empat manfaat dari diplomasi digital, yakni dapat digunakan untuk menyebarkan pesan perdamaian, alat untuk penguatan kerja sama ekonomi, alat untuk melindungi warga negara, dan alat untuk memajukan pembangunan.

Retno menambahkan, melalui RCDD, delegasi dan peserta dapat saling belajar, saling memperkaya pemahaman mengenai diplomasi digital, saling kerja sama dalam menjembatani kesenjangan digital, serta membangun langkah bersama dalam menyikapi berbagai tantangan di milenium baru ini.

Sesi Pembahasan

Konferensi dibagi dalam tiga sesi dengan pembahasan yang berbeda-beda dan berlangsung dengan produktif. Pada sesi pertama, yang disusun dengan konsep persidangan, setiap ketua delegasi diberi kesempatan menyampaikan pandangannya mengenai upaya bersama dalam memaksimalkan manfaat digitalisasi dan kemajuan teknologi. Ketua delegasi juga diberi kesempatan bertukar pengalaman dengan negara-negara peserta dalam merumuskan strategi dan penerapan diplomasi digital serta memastikan diplomasi digital dapat memberdayakan masyarakat, melindungi warga negara, mendorong inovasi, dan menyebarkan

pesan-pesan perdamaian untuk memerangi ekstremisme.

Dalam sesi kedua dan ketiga pembahasan difokuskan untuk menggali potensi serta mengidentifikasi tantangan yang harus dihadapi dunia diplomasi pada era digital. Tema dalam sesi tersebut dihubungkan dengan pencarian guna mengulas pentingnya teknologi informasi dan komunikasi dalam penanganan situasi krisis. Sesi tersebut juga membahas bagaimana perkembangan teknologi digital dapat mendorong pembangunan ekonomi di kawasan.

Pada sesi II yang bertema “The Role of Digital Diplomacy in Crisis Situation”, diskusi panel menggarisbawahi peran teknologi digital dalam mendukung pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi *real-time* dan dalam mengatasi situasi krisis seperti yang telah dilakukan di Australia, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, dan Indonesia. Sesi II menghadirkan Penasihat Senior Pulse Lab Jakarta, Derval Usher; serta narasumber yang mumpuni seperti Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masafumi Ishii; mantan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk ASEAN, Yang Xiuping; Direktur Manajemen Krisis dan Perencanaan Cadangan DFAT Australia, James Buttigieg; Direktur Kebijakan Publik untuk Asia Tenggara Facebook Asia Pasifik, Rahimah Abdulrahim; serta Direktur Pusat Penelitian Ekosistem Bisnis Digital Telkom University, Indonesia, Andry Alamsyah.

Dalam sesi III yang bertema “Utilizing Digital Technology to Achieve the Goals of Diplomacy in Economic Development”, para peserta menyerukan pentingnya pendekatan multi-stakeholder agar pengembangan teknologi digital dapat memperkuat perkembangan ekonomi di kawasan dan gagasan-gagasan bentuk kerja sama di masa yang akan datang. Sesi ini sama menariknya dengan sesi sebelumnya. Timothy Marbun dari *Kompas TV* dihadirkan sebagai moderator. Sedangkan narasumber yang dihadirkan pada sesi ini adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. Narasumber lain yang dihadirkan adalah profesor di Jurusan Keuangan Hanyang University,

Seoul, Korea Selatan, Kang Hyoung-goo; Kepala Kebijakan Publik (ID) Twitter, Agung Yudha; Manajer Senior Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Go-Jek, Presthysa Nagitha Lestari; dan Kepala Strategi dan Pejabat Pemasaran Huawei Wilayah Pasifik Selatan, Lim Chee Siong.

Kerja Sama Ke Depan

Negara-negara peserta juga mendiskusikan Jakarta Message. “Yang akan menjadi referensi bagi kerja bersama dalam meningkatkan diplomasi digital di masing-masing negara, di kawasan, dan di berbagai belahan dunia,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (IDP) Kementerian Luar Negeri, Cecep Herawan. Pesan ini juga akan memuat rencana aksi untuk kerja sama berkelanjutan antarpemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun jejaring regional untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam berdiplomasi.

Dirjen IDP menutup RCDD dengan menyampaikan pentingnya mengembangkan kerja sama diplomasi digital, termasuk melalui kemitraan publik-swasta. Negara-negara peserta diharapkan dapat mencapai konsensus agar konsep Jakarta Message on Regional Conference in Digital Diplomacy dapat disahkan sebagai dokumen hasil RCDD. Inisiatif Pemerintah Republik Indonesia membentuk situs www.rc-dd.com sebagai platform bersama bagi kegiatan berbagai informasi mengenai diplomasi digital di kawasan.

Pada kesempatan ini juga, untuk peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi digital bagi pelaksanaan

diplomasi, melalui RCDD Kementerian Luar Negeri RI akan mengembangkan kerja sama dengan Pulse Lab Jakarta, Diplo Foundation, serta Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Kerja sama yang dimaksud adalah:

- Kerja sama dengan Pulse Lab Jakarta, saat ini sedang mengembangkan aplikasi *monitoring diplomatic cable*.
- Kerja sama dengan Diplo Foundation diarahkan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang diplomasi digital.
- Rencana kerja sama antara Kementerian Luar Negeri RI dan DFAT Australia di bidang diplomasi digital akan difokuskan pada peningkatan kapasitas, kunjungan timbal balik, dan berbagi praktik terbaik dalam diplomasi digital.

Selain pelaksanaan konferensi tersebut, Kementerian Luar Negeri RI juga mengadakan kegiatan lainnya yang bersamaan dan ditujukan bagi para mahasiswa di Jakarta, yakni pameran digital dan acara bincang-bincang (*talkshow*) RCDD, bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), yang dibuka oleh Menteri Retno. Pameran ini berlangsung pada 10-11 September 2019 dan diikuti lebih kurang 1.400 peserta dari berbagai latar belakang. *Showcase* pada pameran ini mencakup 12 startup Indonesia, yakni Ralali, Glexindo, Tele CTG, Logisly, TaniHub, Renom, Modal Rakyat, Kata.ai, Agate, Wahyoo, Bahaso, dan Qiwii.

*Tim Dokumentasi Direktorat Informasi dan Media
Kementerian Luar Negeri RI*



SERUNYA ASEAN CORNER DI DIPLOFEST SEMARANG

S eharian, ASEAN Corner tak pernah sepi. Setidaknya 450 mahasiswa dan pelajar dari Semarang dan sekitarnya memeriahkan stan yang digawangi Ditjen Kerja Sama ASEAN dalam acara Diplofest ke-6 di Simpang Lima, Semarang pada 30 Agustus lalu. ASEAN Corner diselenggarakan untuk mensosialisasikan perkembangan kerja sama ASEAN kepada masyarakat luas, sejak pendiriannya tanggal 8 Agustus 1967, hingga saat ini.

Di stan, para pengunjung bisa menemukan buku-buku mengenai ASEAN. Selain itu, mereka juga bisa belajar tentang ASEAN dari berbagai tayangan video klip. Ada yang mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ada pula tentang pengaruh ASEAN di masyarakat dan cara ASEAN menghadapi bencana.

Pengunjung juga akan melihat berbagai *merchandise* berlogo ASEAN berupa kaos, topi, tas dan *tumbler*. Namun bukan untuk dijual, barang-barang tersebut disiapkan untuk menjadi hadiah bagi pengunjung yang berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kerja sama ASEAN yang dikemas dalam bentuk kuis dan dilakukan dalam beberapa sesi.

Ternyata antusiasme pengunjung mengikuti kuis sangat tinggi. Bahkan ada yang spontan menjawab sebelum pertanyaan selesai. Tak sedikit yang memanfaatkan telepon genggam atau tablet untuk

berselancar di internet mencari jawaban. Banyak juga yang bertahan di ASEAN Corner untuk menunggu sesi kuis berikutnya. Penyampaian kuis-kuis yang menarik, juga mengedukasi, membuat pengunjung bertahan lama di stan.

Selain itu, ASEAN Corner juga membagikan kuesioner ke pengunjung untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka tentang ASEAN dan manfaat organisasi kawasan ini bagi Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa 96 persen responden setuju bahwa ASEAN diperlukan dan bermanfaat, baik bagi seluruh negara anggota, termasuk Indonesia, juga bagi negara-negara di kawasan. Hanya empat persen yang menyatakan kurang setuju.

Hari itu, bukan kali pertama ASEAN Corner ramai pengunjung. Setiap kali Diplofest digelar, stan ASEAN Corner tak pernah sepi tamu. Diplofest sendiri adalah rangkaian acara untuk membumikan capaian diplomasi Indonesia dan menginspirasi para pelajar untuk berprestasi dalam dunia diplomasi, yang dimulai di Yogyakarta pada 26 Oktober 2018 hingga di Semarang. Partisipasi ASEAN Corner pada Diplofest diharapkan dapat lebih meningkatkan *awareness* dan pengetahuan masyarakat luas tentang ASEAN.

Rahmat Azhari

*Kepala Bagian Tata Usaha & Kertas Kerja
Sekretariat Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN*

PERESMIAN GEDUNG SEKRETARIAT ASEAN

Jakarta, 8 Agustus 2019 terasa berbeda. Hari yang istimewa, bertepatan dengan hari jadi ASEAN yang ke-52, di pagi yang cerah hari itu terlihat kerumunan orang-orang yang mengantri masuk ke dalam halaman sebuah gedung putih yang megah. Dijaga ketat, satu persatu orang-orang mulai masuk. Ada yang berjalan kaki dari arah Halte Moda Raya Terpadu (MRT) ASEAN, ada yang turun dari mobil karena jalanan yang ditutup. Dari jalan Trunojoyo No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tampak meluncur perlahan, mobil-mobil pejabat yang turut menghadiri kegiatan tersebut.

Para petugas keamanan berbaju biru dongker memeriksa satu persatu tanda pengenal undangan yang gelisah, khawatir akan kemungkinan nama mereka tidak tercantum dalam daftar registrasi tamu undangan. Keringat yang mengucur, menandakan panasnya udara Jakarta pagi itu, tidak mematahkan semangat. Semua bersiaga, menantikan kehadiran Presiden Joko Widodo.

Dengan desain arsitektur yang unik, menyerupai dua buah trapesium yang dihubungkan dengan sebuah Sky Bridge, menjadi pusat perhatian hari itu. Dilihat dari atas, kedua bangunan putih menjulang menyerupai untaian padi yang diikat jadi satu pada logo ASEAN. Gedung yang gagah menjulang di atas 11.369 meter persegi dengan 16 lantai ini mencoba mengajak seluruh negara anggota ASEAN untuk bersatu, menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

Satu persatu undangan diterima masuk dengan jajaran penerima tamu berpakaian baju nasional negara ASEAN. Jabat tangan dan kecupan di pipi mewakili keakraban yang diutarakan bukan dengan kata-kata. Elevator membawa mereka ke *Nusantara Hall* yang telah diamankan 5 jam sebelum Presiden datang. Sepintas terlihat rombongan wartawan di bagian paling belakang, dengan tembakan-tembakan *flash light* demi gambar-gambar bernilai berita. Beragam warna kulit, warna rambut, warna mata dan bahasa. Tamu-tamu dengan beragam budaya mulai memenuhi ruangan. Masing-masing adalah *creme de la creme*, wakil-wakil terbaik dari berbagai bangsa di dunia.

Diiringi untaian lagu daerah negara ASEAN, tampak aura tegang, khidmad mulai merayap ke dalam ruangan. Pintu bagian kanan ruangan terbuka, masuklah Presiden didampingi Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi; Menteri Perdagangan, Enggartiasno Lukita; Sekretaris Kabinet, Pramono Anung; dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. 400 kursi yang ditata rapih penuh oleh tamu-tamu yang seakan terpaku pada sosok Presiden Indonesia, Joko Widodo. Kapasitas total 600 orang terasa sesak karena banyaknya wartawan yang memenuhi deretan belakang *Nusantara Hall*.

Disamping Presiden, duduk sesosok pria separuh baya, Sekretaris Jenderal ASEAN, Lim Jock Hoi menyampaikan "Sekretariat ASEAN telah menjadi mitra terpercaya di kawan, memfasilitasi semua negara

anggota ASEAN bersama-sama menghadapi tantangan dan mempromosikan stabilitas dan pembangunan regional. Dalam 50 tahun ke depan, gedung ini akan memberikan landasan yang kuat untuk memperdalam upaya membangun komunitas, dengan menciptakan lebih banyak peluang bagi pertemuan fisik, tatap muka, serta interaksi yang akan memperdalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya ASEAN." Lim juga menyampaikan ucapan terima kasihnya bagi Indonesia, khususnya Presiden dan Menlu RI.

Sempat tersandung ketika menaiki panggung, Menlu Thailand, Don Pramudwinai, berseloroh menyampaikan, "Akhirnya saya berhasil naik ke atas panggung", para hadirin pun tersenyum menanggapi gurauan beliau. Menlu Thailand sebagai ketua ASEAN 2019 mengingatkan bahwa pembentukan ASEC merupakan buah dari warisan KTT ASEAN pertama yang diharapkan dapat meningkatkan sentralitas ASEAN, juga meningkatkan pemahaman soal ASEAN. Tidak lupa, Menlu Thailand memuji konsep *green building* yang inklusif sebagai simbol keberlanjutan ASEAN.

Setelah berbulan-bulan persiapan yang menyerap begitu banyak tenaga dan pikiran, yang dinanti pun tiba. Presiden maju ke atas panggung, bernostalgia bahwa perhatiannya kepada ASEAN telah tertanam semenjak beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, 6 tahun yang lalu. ASEAN sebagai motor perdamaian harus memiliki relevansinya dalam menguatkan persatuan, menjaga peran sentralnya sebagai motor perdamaian yang solid dalam menjawab tantangan perubahan. Presiden mengharapkan bahwa gedung baru ini

akan menjadi simbol bagi *the New ASEAN*. Presiden juga menekankan, diadopsinya *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP) merupakan sebuah pegangan bagi ASEAN menghadapi tarik menarik antara kutub kekuatan besar yang akan semakin tajam.

Sebagai tanda simbolis, Presiden menandatangani Plakat Inaugurasi sebagai simbol penyerahan gedung ASEAN dari Pemerintah Indonesia kepada Sekretariat ASEAN. Presiden, Sekjen ASEAN dan para Menlu kemudian berfoto bersama, dengan tangan yang saling terkait "*the ASEAN way*".

Tidak lama, Presiden meninggalkan ruangan. Para tamu kehormatan pun menantikan jabat tangan dengan Presiden sembari beliau berjalan keluar. Dihadang para tamu yang menunggu di lantai 1 untuk sekedar bersewafoto bersama, Presiden dengan penuh senyum menanggapi ungkapan cinta masyarakat kepada pemimpinnya.

Peresmian berlangsung lancar, dilanjutkan dengan pengabdian pesan-pesan Menlu ASEAN dan Sekjen ASEAN dalam kapsul waktu yang akan dibuka di HUT ASEAN ke-75. Apa harapan kamu untuk ASEAN ke depan?

Thalita Hindarto

*Kepala Sub-bagian Analisis Data
Pengumpulan Kertas Kerja dan Pelaporan
Sekretariat Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN*





KEMENTERIAN LUAR NEGERI GANDENG AKADEMISI KRITISI SEKRETARIAT NASIONAL ASEAN-INDONESIA

Tiga akademisi dari Pusat Studi ASEAN (PSA) perguruan tinggi ternama di Jawa Timur bersikap kritis terhadap Sekretariat Nasional (Setnas) ASEAN-Indonesia dalam sebuah diskusi di Kota Malang. Diskusi ini juga dilaksanakan sebagai bagian dari penguatan pembentukan kelembagaan, serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Setnas ASEAN (Association of South East Asian Nations) - Indonesia, sejalan dengan mandat Pasal 13 Piagam ASEAN terkait dengan kewajiban seluruh negara anggota ASEAN untuk membentuk sekretariat nasional di masing-masing negara anggotanya. Lahirnya Setnas ASEAN-Indonesia diawali dengan

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Setnas ASEAN-Indonesia sebagai bentuk nyata usaha Indonesia menjalankan mandat dari Piagam ASEAN. Menyoroti pentingnya kelembagaan Setnas ASEAN, Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Vedi Kurnia Buana, menekankan bahwa Setnas ASEAN akan menjadi wadah bagi sinergi antar-kementerian dan lembaga terkait.

Diawali oleh Duta Besar Foster Gultom, para panelis menyampaikan analisis dan pandangan mereka dalam memajukan Masyarakat ASEAN, disaksikan perwakilan

dari kementerian terkait, serta perwakilan dari Perguruan Tinggi di Jawa Timur. Diskusi hangat berlangsung selama 2 jam, digawangi Dr. Baiq Wardhani, Dra., MA., Ph.D. (Universitas Airlangga, Surabaya), Peggy Puspa H., M.Sc., M.Si (Universitas Muhammadiyah Malang), serta Ari Irawan.,S.E.,M.M (Universitas Brawijaya, Malang), memaparkan beberapa poin penting seperti pentingnya kelembagaan Setnas ASEAN sebagai pempunan aktivitas masyarakat ASEAN.

Dari diskusi tersebut dapat disimpulkan, terwujudnya kelembagaan ASEAN akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia, seperti dukungan sumber daya sehingga Pusat Studi ASEAN dapat berfungsi maksimal sebagai titik kontak diseminasi informasi mengenai ASEAN, juga pemberdayaan Masyarakat Indonesia melalui keuntungan yang didapat dari Kerja Sama ASEAN. Diharapkan dengan dukungan kelembagaan yang lebih kuat, PSA dapat mewujudkan keahlian nya masing-masing untuk mempercepat laju perkembangan masyarakat Indonesia dan ASEAN sebagai manifestasi sinergi Setnas ASEAN dengan akademisi.

Bukan mudah, Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri

luar negeri, serta menyatukan 92 pejabat eselon I dari 48 kementerian dan lembaga. Saat ini, Setnas ASEAN-Indonesia tengah menggodok Rancangan Peraturan Presiden mengenai Kelembagaan serta tupoksi Setnas ASEAN sebagai pempunan kegiatan ASEAN di tingkat nasional. Setnas ASEAN -Indonesia juga merupakan penyimpan informasi mengenai ASEAN di tingkat nasional. Setnas ASEAN ke depannya juga akan mengkoordinasikan persiapan nasional untuk pertemuan-pertemuan ASEAN, sehingga mempercepat pemajuan kesadaran nasional terkait dengan ASEAN yang terwujud melalui rasa kepemilikan masyarakat terhadap ASEAN. Dengan kelembagaan, tugas dan fungsi Setnas ASEAN yang mantap, diharapkan akan mendukung pembentukan rasa kepemilikan terhadap ASEAN melalui pembentukan identitas masyarakat ASEAN yang mumpuni serta rasa kepemilikan yang tinggi.

Thalita Hindarto

Kepala Sub-bagian Analisis Data

Pengumpulan Kertas Kerja

dan Pelaporan

Sekretariat Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN





Dok. ASEAN Foundation

MEMBUKA PINTU KESEMPATAN BAGI IBU DAN ANAK MUDA FILIPINA

Pembawaan Jane Magahnoy yang supel membuatnya terlihat menonjol di antara para peserta Training of Trainer ASEAN Digital Innovative Program di Manila pada 10-14 Juni 2019. Partisipasinya yang sangat aktif selama pelatihan #FutureReadyASEAN membuat kami tertarik untuk mengenal calon pelatih digital bagi anak muda di Filipina itu.

Jane, 42 tahun, adalah seorang lulusan teknik elektronika. Tetapi dia tidak pernah benar-benar bisa mengaplikasikan ilmunya karena setelah lulus Jane malah berprofesi menjadi Fraud and Risk Specialist. Menurut Jane, ini menjadi tantangan bagi anak muda Filipina saat ini, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang dapat memandu para lulusan muda untuk mengetahui apa langkah yang harus ditempuh setelah lulus dari institusi pendidikan. Sehingga akhirnya banyak yang mendapatkan pekerjaan yang tidak cocok dengan latar pendidikan mereka.

Sebelas tahun lalu, Jane memutuskan untuk bekerja dari rumahnya. Ketertarikannya pada dunia digital

memuatnya bekerja dari rumah dan menjadi *online marketer*. Ia pun membantu para ibu pekerja kantoran di Filipina yang ingin bekerja dari rumah. Baginya, saat ini, keterampilan digital adalah salah satu kemampuan sangat penting yang harus dimiliki. "Program #FutureReadyASEAN ini merupakan inisiatif dan sarana advokasi yang hebat untuk memberdayakan kaum muda, khususnya di Filipina. Saya yakin sekali pelatihan ini akan memberi dampak besar dalam kehidupan mereka," kata Jane.

Setelah mengikuti pelatihan #FutureReadyASEAN, Jane langsung membagikan apa yang ia peroleh dalam pelatihan itu kepada kedua anaknya. Jane membagikan modul Digital Citizen yang ada di platform www.futurereadyasean.org dan mengenalkan Minecraft Hour of Code pada mereka. Lewat sesi belajar 20 menit itu, Jane menemukan dua karakter yang sangat berbeda dari anak-anaknya. Anak pertamanya, seorang pria, sangat bertekad menyelesaikan masalah, sementara anak keduanya, seorang perempuan, terus mengeluh dan akhirnya menyerah. "Hal ini akan menjadi tantangan bagi saya, khususnya menanamkan kesadaran untuk

terampil secara digital pada anak saya, karena saya percaya kesadaran tersebut harus ditanamkan sedini mungkin," tutur Jane.

Bekerja dengan kaum muda bukanlah hal baru bagi Jane. Pada tahun lalu, dia pernah menjadi salah seorang pelatih untuk Pelatihan Teknis Sumber Dampak Pedesaan dan bekerja langsung dengan anak muda. Ini adalah program yang digagas oleh Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Filipina, yang bertujuan menciptakan pekerjaan di pedesaan dan bahkan ke daerah-daerah yang jauh dengan melatih mereka sebagai pekerja lepas *online*. Program tersebut berusaha membangun kesadaran bahwa di masa serba digital ini, masyarakat desa tidak perlu lagi pergi ke kota-kota besar untuk mencari peluang kerja. Setiap anak muda dapat memperoleh pendapatan selama memiliki keterampilan, internet, dan laptop.

Pelatihan #FutureReadyASEAN dari ASEAN Digital Innovative Program diharapkan dapat menjangkau 8.000 anak muda yang kurang beruntung di Filipina untuk mendapatkan keterampilan digital. Jane sendiri sudah memiliki strategi untuk membantu mencapai angka tersebut. Dia sedang mempersiapkan diri menjangkau 100 pemuda. Namun Jane juga akan membagikan pelatihan ini kepada komunitas ibu yang ada di jejaringnya. Mengapa ibu? Karena masih

banyak ibu yang belum terampil secara digital dan belum sadar akan manfaat besar di balik keterampilan digital. Jane sangat yakin manfaat yang diperoleh para ibu dari pelatihan ini akan berdampak juga kepada anak-anak mereka.

Future Ready ASEAN adalah platform *online* yang dikembangkan dalam kemitraan antara ASEAN Foundation dan Microsoft sebagai bagian dari program Inovasi Digital ASEAN. Diluncurkan pada Maret 2019, program ini bertujuan untuk melatih 520 guru dan 46ribu anak muda yang kurang beruntung berusia 15-35 tahun tentang keterampilan digital, khususnya pendidikan ilmu komputer, untuk memungkinkan mereka berkembang dalam revolusi industri keempat. Pelatihan akan memanfaatkan platform Future Ready ASEAN dan dilakukan oleh Empire Code sebagai pelatih utama di tujuh negara ASEAN, yaitu Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Tomy Rado Prawiro Sinaga

Konsultan Komunikasi
ASEAD Digital Innovation Programme



Dok. ASEAN Foundation

KESEMPATAN TANPA BATAS TEMAN DISABILITAS

Dok. ASEAN Foundation

Suasana begitu ramai se usai acara *Training of Trainer ASEAN Digital Innovative Programme* pertama di Universitas Pancasila, Jakarta pada 9-10 Mei 2019. Para peserta yang terdiri dari tenaga pendidikan dan *trainer* dari berbagai lembaga swadaya masyarakat bercengkerama sambil menunggu waktu pulang.

Di antara kerumunan, tampak satu orang yang sulit diabaikan. Dia adalah Irfan Priyadi, pria berusia 34 tahun yang meski memiliki keterbatasan dalam melihat namun memiliki energi yang luar biasa dan gampang menular. “Kecintaan saya pada teknologi adalah salah satu alasan kenapa saya mengikuti pelatihan #FutureReadyASEAN,” ungkap Irfan.

Future Ready ASEAN adalah platform online yang dikembangkan melalui kemitraan antara ASEAN Foundation dan Microsoft, sebagai bagian dari program Inovasi Digital ASEAN yang berfokus pada pengembangan kemampuan digital untuk anak muda

yang masih kurang terlayani dalam akses digital di ASEAN. Irfan adalah salah satu peserta pelatihan yang berasal dari Kartunet, sebuah komunitas yang menjadi wadah bagi komunitas disabilitas untuk belajar tentang teknologi dan menyalurkan kreativitas. Sebagai manajer relawan di Kartunet, Irfan melakukan advokasi secara reguler untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masyarakat inklusif. Di luar kegiatannya di Kartunet, Irfan juga bekerja sebagai karyawan di pusat pendidikan dan pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.

“Pelatihan ini selaras dengan pekerjaan saya karena saya bertanggung jawab untuk memasukkan data, mengoperasikan dan mengelola konten *website*,” katanya. “Saya sangat yakin sesi *coding* akan membantu pekerjaan saya ke depannya dan saya ingin menerapkan apa yang saya pelajari dalam kehidupan kerja saya sehari-hari.”

Irfan percaya bahwa mendapatkan kesempatan untuk

belajar tentang teknologi digital, seperti apa yang dia dapatkan dari pelatihan #FutureReadyASEAN, akan membuka lebih banyak pintu kesempatan, terutama bagi komunitas disabilitas. Salah satunya adalah terbukanya peluang kerja yang lebih besar.

Irfan sangat berharap akan lebih banyak lagi teman disabilitas yang akan tertarik untuk belajar tentang teknologi. “Sebagai bagian dari komunitas disabilitas, saya bisa mengatakan bahwa teknologi telah membuat hidup kami lebih baik dan membantu saya mengatasi keterbatasan yang ada,” katanya.

Irfan juga bercerita bahwa berkat teknologi, ia akhirnya bisa bersaing dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil. Dengan teknologi jugalah, ia bisa menjadi guru di sekolah dengan murid non-disabilitas. Irfan bercerita, saat pendaftaran awal seleksi CPNS, karena seleksi administrasi bersifat terpusat dan online melalui website, Irfan yang sudah belajar komputer dan mengenal internet tidak mengalami kesulitan saat mengikuti seleksi.

Setelah mengikuti pelatihan #FutureReadyASEAN, Irfan berjanji akan menyebarkan ilmu yang dia dapatkan. Bahkan ia telah merumuskan rencana terkait cara menyebarkan pengetahuan tersebut. “Setelah kegiatan pelatihan ini, saya akan membagikan pengetahuan yang saya dapatkan terlebih dahulu kepada tim internal di komunitas kami di Kartunet, dan setelahnya kami akan merancang kegiatan yang berkaitan dengan teknologi untuk kaum muda dari komunitas disabilitas,” kata Irfan.

Pelatihan #FutureReadyASEAN dari *ASEAN Digital Innovative Programme* diharapkan dapat menjangkau 8.000 anak muda yang belum memiliki akses terhadap dunia digital di Indonesia hingga Desember 2019 untuk belajar keterampilan digital, khususnya pendidikan ilmu komputer, yang memungkinkan mereka untuk berkembang dalam revolusi industri keempat. Program pelatihan yang diluncurkan pada Maret 2019 menargetkan akan melatih 520 guru dan 46.000 anak muda yang kurang terlayani dalam akses digital di ASEAN yang berusia 15 hingga 35 tahun. Pelatihan akan memanfaatkan platform Future Ready ASEAN dan

dilakukan oleh Empire Code sebagai pelatih utama di tujuh negara ASEAN (Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam).

Pelatih yang sangat berkomitmen seperti Irfan akan memainkan peran kunci untuk mencapai angka tersebut dengan meningkatkan kemampuan digital kaum muda yang kurang beruntung, khususnya kaum muda dari komunitas disabilitas.

“Setelah teman-teman dari komunitas disabilitas memiliki literasi teknologi yang lebih baik, kami akan lanjut mengajari teman-teman dari non-disabilitas,” Irfan menutup perbincangan.

Tomy Rado Prawiro Sinaga

Konsultan Komunikasi

ASEAD Digital Innovation Programme



Shutterstock/alphaspirt



Presiden, Menteri Luar Negeri dan Sekretaris Jenderal ASEAN menelaah maket desain gedung baru ASEAN

Dok. Pribadi



Lobby Gedung Sekretariat ASEAN

Dok. Pribadi



Public Lecture Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN di Universitas Katolik Soegijapranata pada rangkaian kegiatan Diplomacy Festival Semarang

Dok. Pribadi



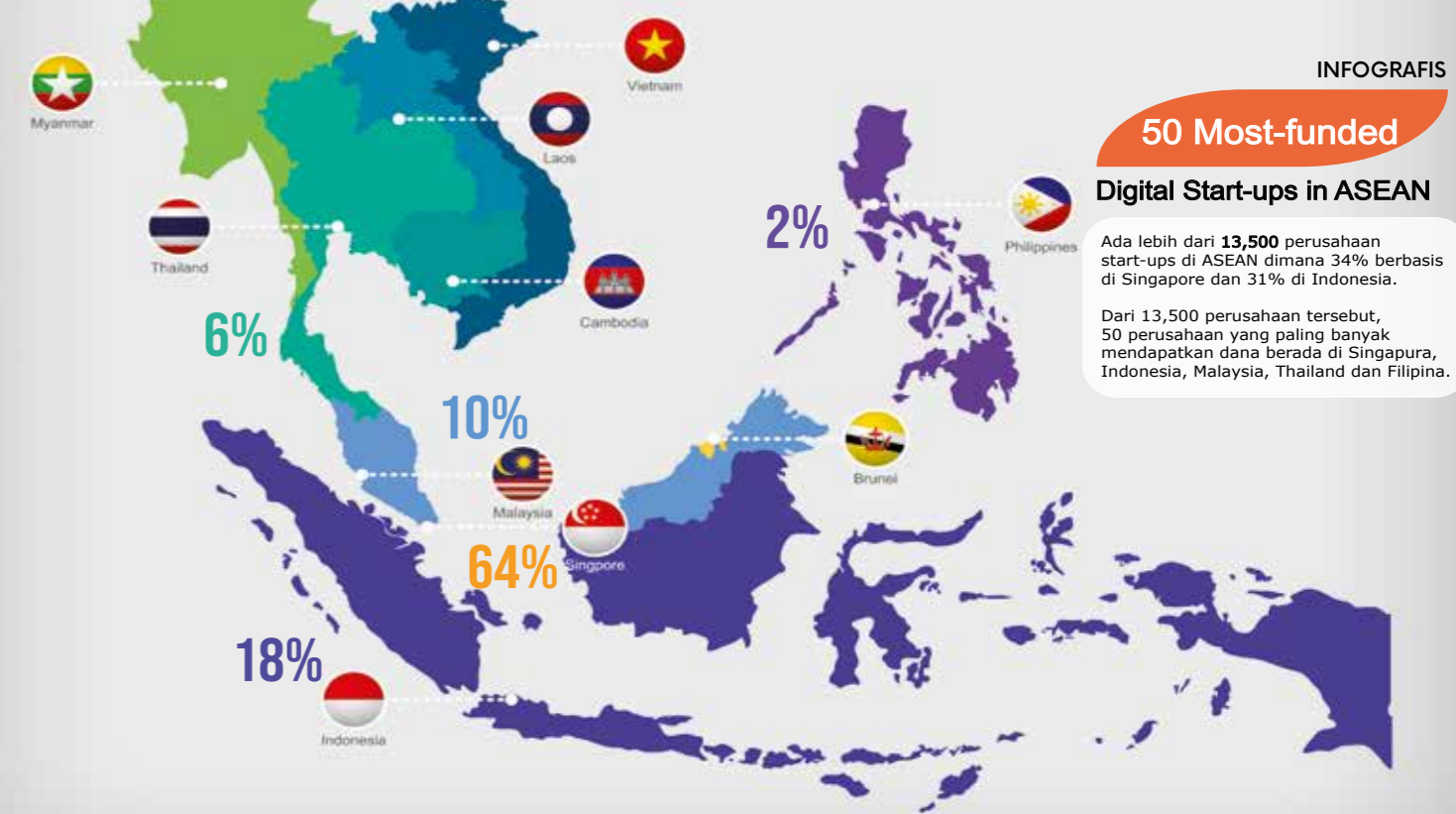
Talk Show Menlu RI di Auditorium Prof. Seodarto, Universitas Diponegoro pada rangkaian kegiatan Diplomacy Festival Semarang

Dok. Pribadi

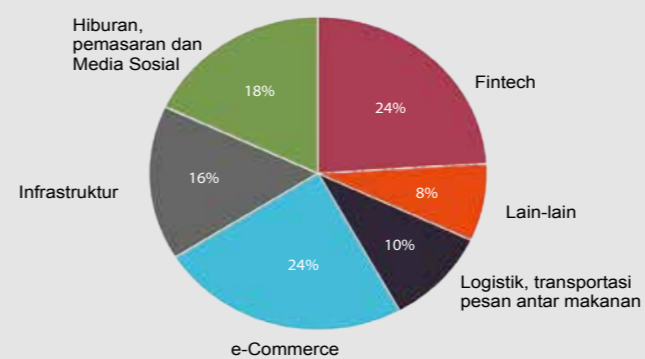


Malam Konser Diplifest Semarang

Dok. Pribadi



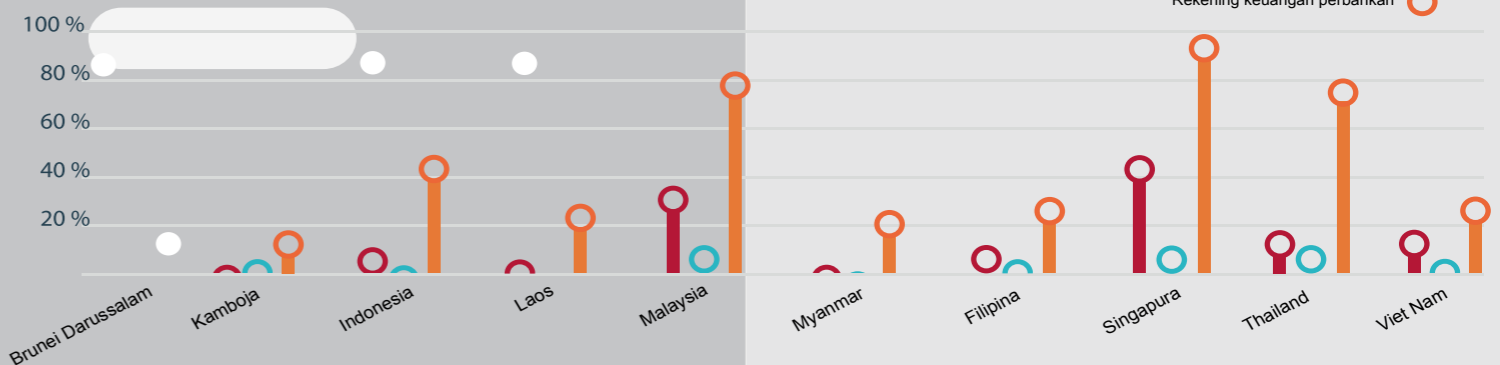
Distribusi berdasarkan Jenis Industri



Top 5 Perolehan Pendanaan



Penggunaan Internet dan e-Commerce, 2017



Terjadi peningkatan konsep berbelanja daring, namun sebagian besar negara-negara ASEAN hanya sebagian kecil dari pengguna internet yang berbelanja daring



Sumber: ASEAN Investment Report 2018 Foreign Direct Investment and the Digital Economy in ASEAN, 2018

MAJALAH MASYARAKAT ASEAN GOES DIGITAL



Majalah Masyarakat ASEAN hadir dalam format digital yang dapat diakses melalui:

www.kemlu.go.id

SITUS KEMENTERIAN

- Ketik "Majalah Masyarakat ASEAN" pada kolom "cari atau search."
- Klik edisi Majalah Masyarakat ASEAN yang ingin Anda baca.



<http://setnas-asean.id/>

SITUS SEKRETARIAT NASIONAL ASEAN-INDONESIA

- Cari menu "referensi" dan pilih "Majalah Masyarakat ASEAN."
- Klik edisi Majalah Masyarakat ASEAN yang ingin Anda baca.



MEDIA SOSIAL

- Instagram:
[@majalah_masyarakat_asean](https://www.instagram.com/majalah_masyarakat_asean)
[@aseanadalahkita](https://www.instagram.com/aseanadalahkita)
- Facebook:
[AyokenaliASEAN](https://www.facebook.com/AyokenaliASEAN)



APLIKASI GOOGLE PLAY

- Pilih menu Books dan ketik "Ditjen Kerjasama ASEAN" pada kolom pencarian.
- Klik edisi Majalah Masyarakat ASEAN yang Anda ingin baca.